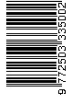


edisi KHUSUS

mediabpp

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

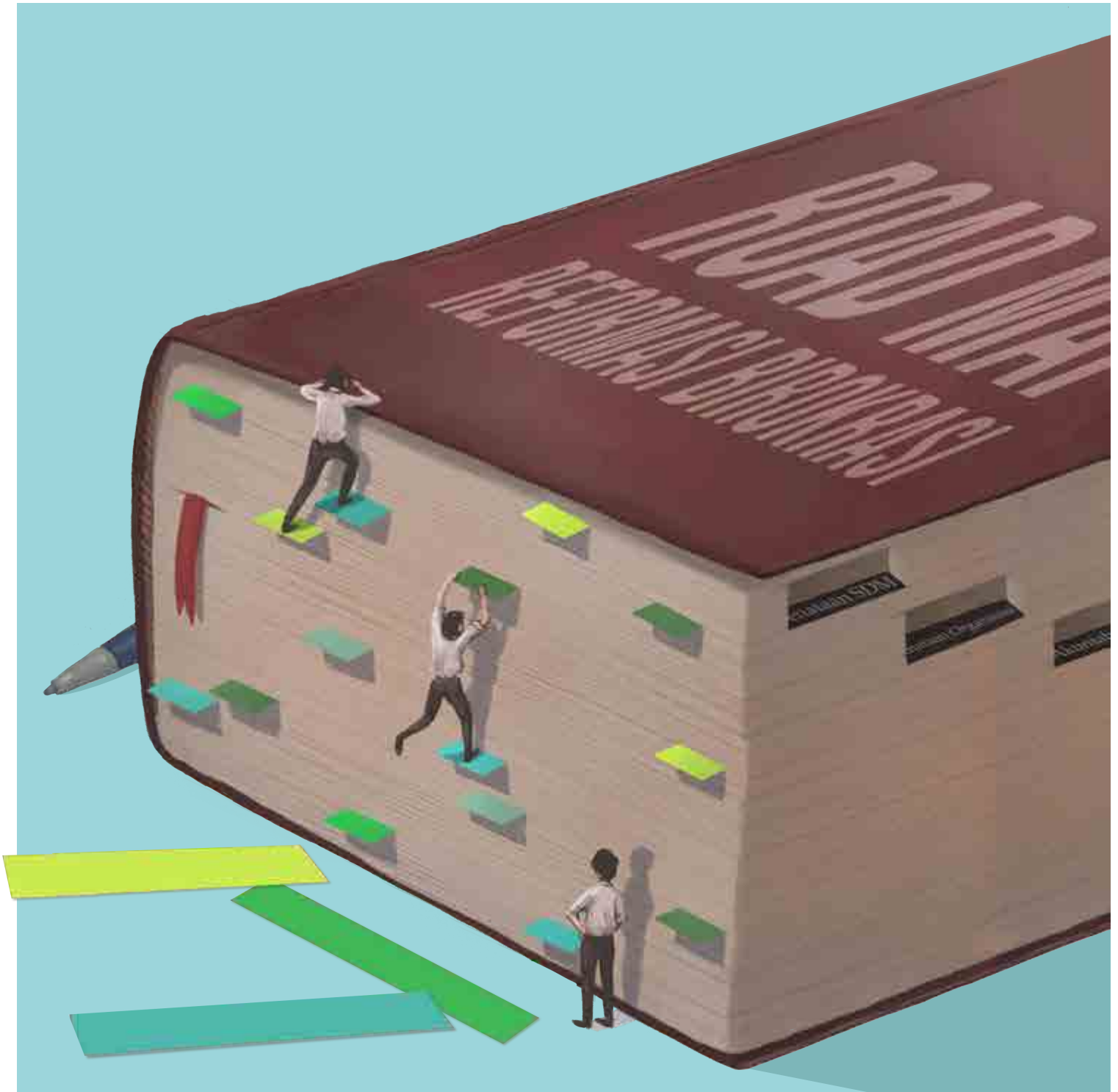


BABAK BARU REFORMASI BIROKRASI

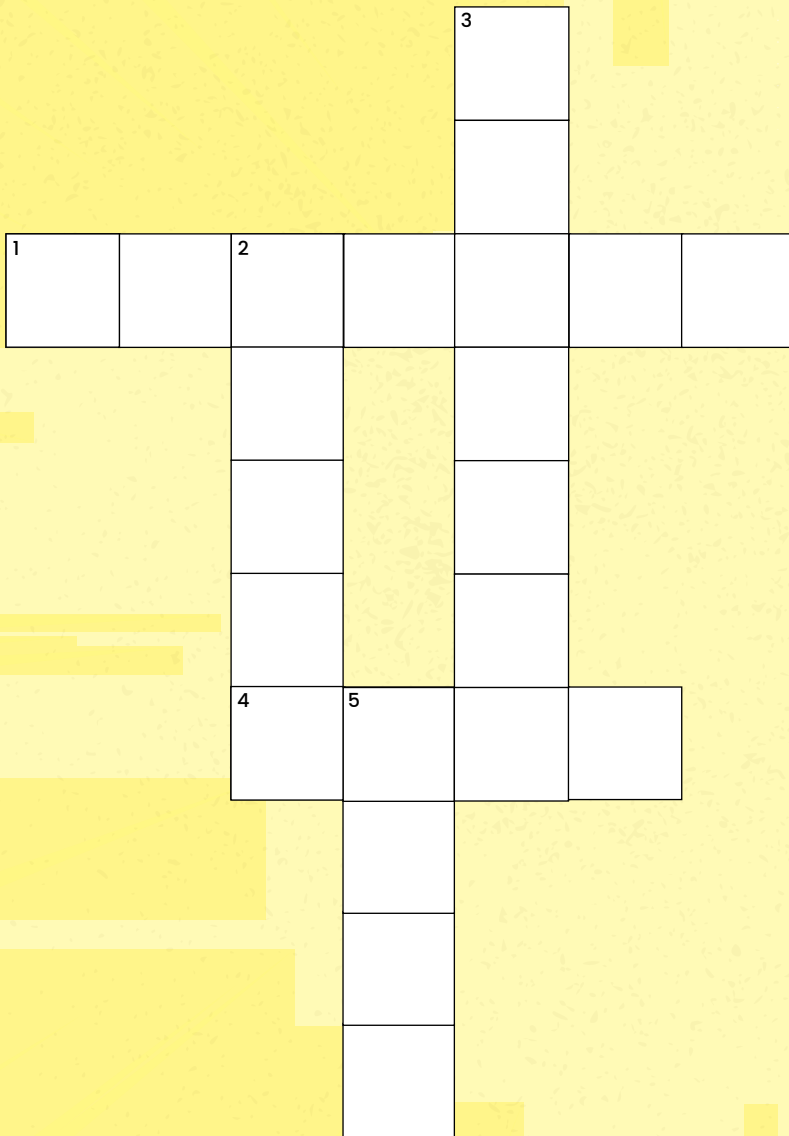
MEI-JUNI 2021

MAJALAH DWI BULANAN

VOL.6 NO.3



Teka-Teki Silang



Mendatar :

- 1 Sinonim terobosan
- 4 Akronim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurun :

- 2 Pendapat
- 3 Lawan kata teori
- 5 Perberlakukan Pembatasan Kegiatan

Jawaban bisa dikirim melalui direct message (DM) Instagram @badanlitbangkemendagri atau email pid@litbangkemendagri.com. Wajib follow akun Instagram @badanlitbangkemendagri sebelum mengirimkan jawaban Anda. Jangan lupa melampirkan nama, alamat, dan kontak telepon yang bisa dihubungi. Satu pemenang akan mendapat merchandise menarik dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

MENUJU ERA BARU REFORMASI BIROKRASI

Tahun 2020-2024 menjadi penanda reformasi birokrasi memasuki era baru. Sejak digaungkan tahun 2010 lalu, reformasi birokrasi terus mengalami penyempurnaan. Berbagai pembenahan terus dilakukan demi mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, cepat, efektif, dan akuntabel. Dalam *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024 atau memasuki periode ketiga reformasi birokrasi, fokus perbaikan ditujukan kepada *dynamic governance* (birokrasi yang dinamis). Dengan fokus tersebut, diharapkan terbentuk tata kelola pemerintahan berkelas dunia (*world class bureaucracy*).

Merespons hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) langsung bergerak cepat. Berbagai pembenahan dilakukan menyeluruh, mulai dari tata laksana, penyederhanaan struktur, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain itu, Kemendagri juga menargetkan perolehan skor A pada indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dan 2021. Dengan demikian, kesiapan dalam melakukan perbaikan reformasi birokrasi menjadi niscaya.

Sementara itu, Badan Litbang Kemendagri dalam kapasitasnya sebagai lembaga *think tank* juga melakukan sejumlah gebrakan kebijakan. Gebrakan tersebut seperti mendorong penguatan inovasi, meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), serta melakukan kajian dan penelitian yang optimal. Diharapkan, ikhtiar tersebut dapat mendorong capaian reformasi birokrasi yang maksimal di lingkup Kemendagri.

Pembaca sekalian, pada edisi kali ini Media BPP berupaya mengulas penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Kemendagri dan Badan Litbang Kemendagri. Tidak hanya itu, edisi kali ini juga menyajikan informasi mengenai kiprah Badan Litbang Hukum dan Ham dalam membenahi pelayanannya. Hal itu ditambah dengan informasi tentang sepak terjang Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kemendagri dalam mencapai predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu, pada rubrik Lebih Dekat juga memuat sepak terjang Prof. Erwan Agus Purwanto yang memiliki konsen terhadap birokrasi.

Seluruh informasi yang disajikan merupakan ikhtiar Media BPP dalam mendorong pemahaman publik mengenai pentingnya pembenahan birokrasi yang menyeluruh. Selain itu, diharapkan pula ikhtiar tersebut dapat memberi inspirasi agar tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia dapat dicapai bersama. Semoga.

Kurniasih

Sekretaris Badan Litbang Kemendagri



Di balik Goresan Sampul:

Para aparatur sedang berusaha memanjat buku *road map* reformasi birokrasi. Mereka memanfaatkan kertas catatan yang disematkan dalam masing-masing bab pada buku tersebut. Ilustrasi itu dapat diartikan sebagai upaya dari pemerintah untuk mencapai target reformasi birokrasi yang tertuang dalam *road map* periode 2020-2024.

mediabpp

JENDELA INFORMASI KELITBANGAN

VOLUME 6 NOMOR 3 MEI-JUNI 2021

PELINDUNG

MENTERI DALAM NEGERI

PENANGGUNG JAWAB

A. FATONI

PEMIMPIN REDAKSI

KURNIASIH

REDAKTUR PELAKSANA

AJI NUR CAHYO

REDAKTUR

MATHEOS TAN

DEDDY WINARWAN

SUMULE TUMBO

MOHAMMAD NOVAL

PENYUNTING

FRISCA NATALIA

PELIPUTAN

AHMAD FARID

PENATA LETAK

FAJAR HARAMUKTI

ILUSTRASI COVER

TRES AGUS

Diterbitkan oleh:



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
pid@litbangkemendagri.go.id

Frekuensi terbitan : 2 bulanan

Nomor ISSN : 2503-3352 (media cetak)

Keterangan : Kategori sosial

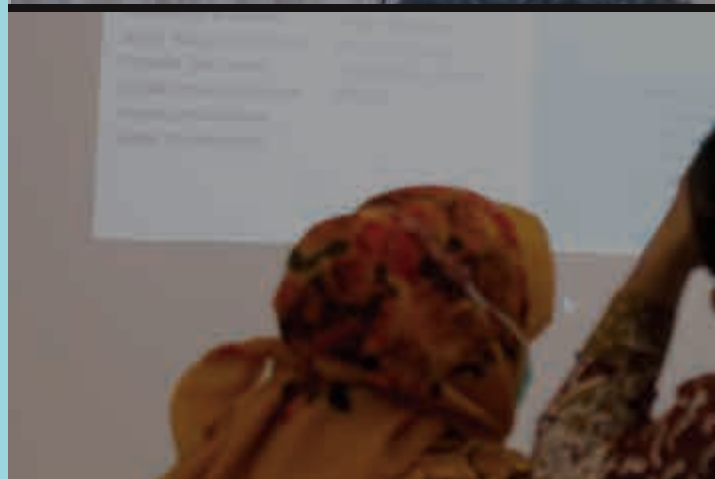
SK no. 0005.25033352/Jl.3.1/SK.ISSN/2016.04

20 April 2016 (mulai edisi Vol. 1, No. 1, April 2016)



Badan Litbang Kemendagri lakukan
Asistensi Pengukuran Indeks Pengelolaan
Keuangan Daerah

4



lensa matra



36



jendela BPP

Penguatan Inovasi Daerah bukan hanya pada Kuantitas tetapi perlu juga Penguatan Kualitas

8



aktivitas

Kepala Badan Litbang
Kemendagri
uraikan Strategi
Peningkatan Inovasi

12



aktivitas

Kemendagri: Pemerintah Daerah Wajib Laporkan Inovasi yang Dilakukan

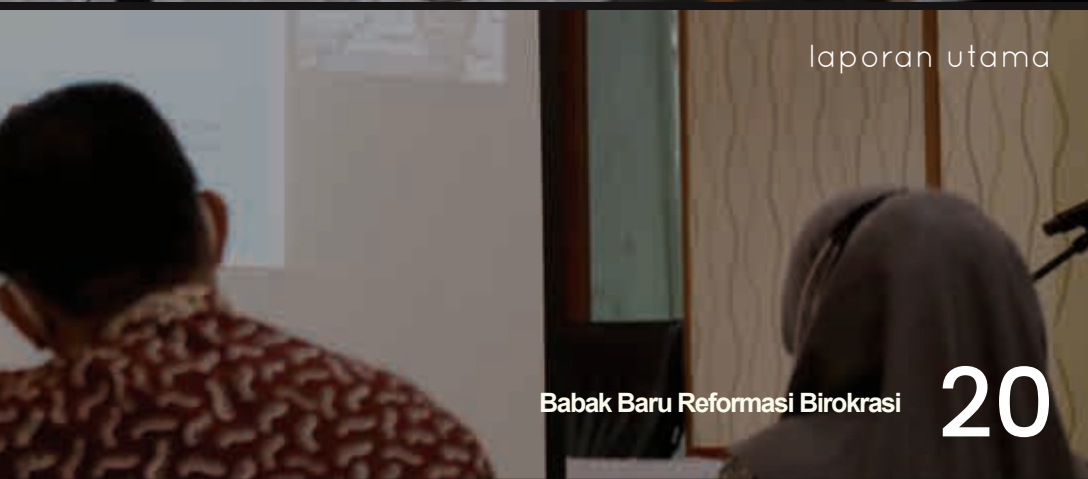
14



laporan utama

Atur Pembinaan
Pelayanan,
Capai Penghargaan

30



laporan utama

Babak Baru Reformasi Birokrasi

20



lebih dekat

Atur Strategi Benahi Birokrasi

40



resensi film

De Oost

54



BADAN LITBANG KEMENDAGRI LAKUKAN ASISTENSI PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Badan Litbang Kemendagri melakukan asistensi kepada seluruh Bappeda dan Litbang Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat atas hasil simulasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), Jumat, 18 Juni 2021. Asistensi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman penggunaan sistem, sehingga kesalahan penginputan data indeks dapat diminimalisir. Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan pengukuran IPKD sangat penting untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. “Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah,” kata Fatoni sekaligus membuka acara secara virtual.

Dirinya menambahkan, pengukuran IPKD dapat memotivasi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Hal ini karena pemda dituntut untuk menyampaikan data pengelolaan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Selain itu, data-data pengelolaan keuangan daerah dapat dipantau melalui sistem indeks secara otomatis, sehingga peran pengawas internal dapat ditingkatkan. “Dengan indeks ini, pemda bisa mengukur kualitas tata kelola keuangan daerahnya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sumule Tumbo, mengatakan secara teknis IPKD memuat enam dimensi pengukuran. Antara lain kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD,



Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah pada acara Evaluasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Povinsi Jawa Barat secara virtual di Aula Badan Litbang Kemendagri, Jumat (18/06/2021).

transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Keenam dimensi tersebut nantinya akan digunakan untuk mengukur indeks pengelolaan keuangan daerah pada tiga klaster kemampuan keuangan daerah, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. “Dari pengukuran ini, pemda dengan hasil penilaian terbaik secara nasional akan diberikan penghargaan,” kata Sumule.

Selain itu, Sumule melanjutkan, pengukuran IPKD juga akan menampilkan penilaian kepada pemda dengan predikat pengelolaan keuangan daerah terburuk. Dengan data tersebut, Kemendagri dapat melakukan pembinaan khusus. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah, perlu dilakukan pengukuran IPKD.

Sumule menambahkan, saat ini pihaknya telah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah. Dirinya mengimbau agar seluruh pemda dapat segera melakukan penginputan data pengelolaan keuangannya kedalam sistem IPKD. Hal ini agar Badan Litbang Kemendagri dapat melakukan pengukuran pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. “Diimbau para gubernur menyampaikan laporan hasil pengukuran IPKD kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir Juli,” tegasnya.

• **Farid**



KEMENDAGRI:
DALAM BERINOVASI PEMDA
PERLU BERKOLABORASI DENGAN
AKTOR INOVASI DAN
STAKEHOLDER LAINNYA



Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Litbang Kemendagri), Agus Fatoni mengimbau pemda perlu berkolaborasi dalam melakukan inovasi. “Kolaborasi ini penting, sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman, saling belajar antara yang satu dengan yang lainnya, saling mengisi kekurangan masing-masing, saling melengkapi keterbatasan yang ada, saling mendukung dan menguatkan, serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi,” ungkap Fatoni.

Menurutnya pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan aktor inovasi dan *stakeholder* lainnya, di antaranya, akademisi atau perguruan tinggi, swasta atau sektor privat, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, serta media. Selain itu, lembaga think tank juga perlu dilibatkan dalam aktivitas inovasi. “Dengan berkolaborasi dengan para aktor, daerah dapat mengatasi berbagai keterbatasan saat ingin melakukan inovasi. Sehingga upaya ini akan memacu perkembangan inovasi daerah dan lebihnya cepat dirasakan masyarakat,” sambung Fatoni saat menjadi narasumber secara virtual dalam acara Sosialisasi Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Jumat, 30 Juli 2021.

Guna mendukung kolaborasi dalam berinovasi, imbuh

Fatoni, daerah dapat membangun simpul inovasi (*innovation hub*). Simpul tersebut dapat digunakan sebagai sarana mengintegrasikan segenap aktor inovasi secara fisik atau virtual untuk memadukan gagasan dan ide dalam berinovasi, membahas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam berinovasi, dan memperkuat kolaborasi. Melalui *innovation hub*, Fatoni berharap daerah dapat menciptakan inovasi yang mampu bersaing secara global. Selain itu, inovasi yang lahir dari aktivitas kolaborasi dapat lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dan daya saing.

Dalam kesempatan itu, Fatoni juga mengingatkan bahwa usulan inisiatif inovasi daerah bisa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari kepala daerah, DPRD, ASN, perangkat daerah, hingga anggota masyarakat. Skema pengusulannya pun juga sudah dijelaskan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. “Peraturan perundang-undangan telah memudahhi semua kalangan untuk bisa berinovasi. Dan aktivitas tersebut mendapat jaminan perlindungan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 389 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Fatoni.

• Farid



PENGUATAN INOVASI DAERAH

***BUKAN HANYA PADA KUANTITAS,
TETAPI PERLU JUGA
PENGUATAN KUALITAS***



Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni saat menjadi narasumber secara virtual dalam Pemantapan Teknis Penginputan Indikator dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kamis 29 Juli 2021.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan, pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah tidak hanya didasarkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas inovasi yang dihasilkan. Selama ini, banyak pemerintah daerah hanya fokus menambah jumlah inovasi, tapi tidak melakukan penguatan terhadap kualitasnya. Akibatnya, kendati inovasi yang diinput berjumlah banyak, namun capaian itu tidak menunjang hasil nilai indeks yang maksimal. “Hal ini dikarenakan inovasi yang dilaporkan tidak disertai dokumen yang memadai, sehingga nilai kematangan inovasi tersebut rendah atau bahkan tidak bisa dinilai,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni secara virtual dalam acara Pemantapan Teknis Penginputan Indikator dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kamis, 29 Juli 2021.

Fatoni mencontohkan, pada ajang Indeks Inovasi Daerah tahun 2020 pencapaian Kabupaten Tabalong dinilai belum maksimal. Kondisi ini disebabkan karena hasil inovasi yang dilaporkan kurang matang. “Salah satu pemicunya karena tidak disertakannya *evidence based* saat melakukan

penginputan inovasi,” ujar Fatoni.

Dirinya mengimbau, agar kematangan inovasi perlu juga diperhatikan. Dalam kesempatan tersebut, Fatoni mengungkapkan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah. Peningkatan kualitas inovasi bisa dilakukan dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dan program, termasuk menyelesaikan berbagai permasalahannya. Menurut Fatoni, ikhtiar ini diyakini dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, dirinya menambahkan, kualitas inovasi dapat ditunjang melalui peningkatan infrastruktur inovasi. Peningkatan tersebut, kata dia, dapat dicapai dengan dukungan regulasi, sumber daya inovasi yang mumpuni, anggaran, serta memperbanyak bimbingan teknis. “Kualitas inovasi juga perlu didorong dengan penggunaan IT pada proses birokrasi,” ungkapnya.

• Farid

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah

Kementerian Dalam Negeri terus mendorong agar pemerintah daerah membangun ekosistem inovasi. Upaya ini dilakukan agar iklim inovasi di daerah dapat kondusif, sehingga berdampak pada pesatnya perkembangan inovasi dalam menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan daerah yang terjadi. “Daerah harus serius dan berkomitmen untuk membangun ekosistem inovasi. Untuk itu perlu keterlibatan peran interaksi dari 6 aspek di antaranya: keterlibatan aktor inovasi, dukungan iptek, peran institusi, dukungan regulasi, dukungan anggaran, dan tata kelola SDM,” ujar Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni saat menjadi pembicara kunci dalam webinar *Best Practice* Inovasi Daerah dan Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021, Rabu, 4 Agustus 2021.

Aktor inovasi, lanjut Fatoni, dapat berasal dari kalangan akademisi, swasta atau sektor privat, tokoh masyarakat

dan organisasi kemasyarakatan, dan media. Selain itu lembaga *think tank* juga perlu dilibatkan dalam aktivitas inovasi. “Mereka semua harus berperan sebagai aktor kunci yang saling berkolaborasi dan berperan dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk tujuan yang sama, menghasilkan inovasi. Tidak boleh ada aktor yang dirugikan dalam ekosistem inovasi,” kata Fatoni. Konektivitas antar aktor inovasi menurutnya juga penting agar memperkuat dampak dari inovasi di masyarakat.

Di sisi lain, interaksi dalam ekosistem inovasi memerlukan dukungan regulasi berupa kebijakan inovasi dari pemerintah daerah. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, atau peraturan perundang-undangan lainnya. “Guna memajukan inovasi, intervensi pemerintah daerah melalui kebijakan inovasinya merupakan aspek yang sangat penting. Kepala daerah harus menciptakan wilayah yang ramah inovasi dan men-



BANGUN EKOSISTEM INOVASI UNTUK MENGUBAH BUDAYA KERJA DAN MENINGKATKAN KINERJA

dukung kemajuan iptek di daerahnya. Kemajuan iptek ini dapat digunakan sebagai solusi atas masalah yang ada,” terang Fatoni.

Dirinya juga menekankan, dalam membangun ekosistem inovasi, dukungan anggaran juga diperlukan. Meski aspek tersebut bukan merupakan faktor penentu, namun dengan dukungan anggaran yang memadai dirinya meyakini inovasi dapat lebih cepat berkembang. “Untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung inovasi, pemda dapat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, atau mengelolanya melalui cara-cara inovatif sehingga anggaran dapat dialokasikan secara efektif dan efisien,” jelas Fatoni.

Pada kesempatan tersebut, Fatoni mengingatkan agar SDM aparatur di daerah dapat mengubah *mindset* dan menjadikan inovasi sebagai budaya dalam bekerja. “Perubahan *mindset* ini penting, karena akan berpengaruh pada pola

pikir, selanjutnya berpengaruh pada pola kerja, dan pada akhirnya akan dapat merubah budaya kerja yaitu budaya kerja yang inovatif,” pungkask Fatoni.

Sebagai informasi webinar tersebut turut dihadiri Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Selain itu turut hadir pula Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Litbang/ Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kelitbangan, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro/ Kepala Bagian Organisasi, ditambah dari unsur perguruan tinggi, praktisi, pengamat dan masyarakat umum.

• Farid



Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni saat menjadi narasumber secara virtual dalam Agenda Webinar Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Evaluasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa, 13 Juli 2021

Guna meningkatkan inovasi, pemerintah daerah (pemda) dinilai perlu menyiapkan sejumlah strategi. Strategi tersebut perlu dijalankan mengingat tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan dalam upaya peningkatan inovasi, pemda perlu membangun ekosistem inovasi. “Inovasi perlu dijadikan sebagai indikator kinerja dalam organisasi. Melalui upaya tersebut, kinerja aparatur akan meningkat,” kata Fatoni saat menjadi pembicara dalam agenda webinar Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Evaluasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa, 13 Juli 2021.

Dirinya menambahkan, guna membangun inovasi yang

berkelanjutan, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat dibutuhkan. Mengingat, IPTEK mampu menunjang pemda dalam menggali masalah dan menentukan kebutuhan organisasi dalam merumuskan rencana aksi inovasi. Selain itu, aktor inovasi dari universitas, lembaga *think tank* independen, akademisi, masyarakat, dan juga pegiat inovasi lainnya perlu dilibatkan. “Selain unsur-unsur tersebut, dalam membangun ekosistem inovasi juga perlu diperkuat dengan regulasi seperti Perda atau Perkada. Kehadiran institusi yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan juga berperan penting” katanya.

Menurut Fatoni, kendati bukan menjadi faktor penentu terciptanya ekosistem inovasi, pemda dinilai perlu mengalokasikan anggaran yang ideal untuk inovasi. Hal ini pent-



KEPALA BADAN LITBANG KEMENDAGRI URAIKAN STRATEGI PENINGKATAN INOVASI DAERAH

ing dilakukan guna mendorong percepatan implementasi kebijakan inovasi melalui pemberian insentif. Fatoni menambahkan, dalam menunjang inovasi pemda dapat memfokuskan pada 6 area. Di antaranya inovasi di bidang administrasi di mana pemda bisa mengadopsi cara baru dalam mengelola pemerintahan serta melakukan revolusi administrasi birokrasi secara akuntabel. Selain itu, pemda perlu memfokuskan inovasi di bidang manajemen yang memungkinkan pemda untuk melakukan pembaruan total terhadap prosedur birokrasi. Pemda juga perlu menjalankan inovasi kebijakan dengan pendekatan yang lebih efisien, implementatif, dan dapat diadopsi berbagai pihak.

Di sisi lain, imbuh Fatoni, pemda juga dapat menjalankan inovasi frugal. Terobosan tersebut berfokus pada upaya

menciptakan inovasi produk dengan biaya lebih murah dibanding produk yang telah ada. Langkah ini dinilai mampu membantu kinerja pemerintah daerah lebih optimal, mengingat inovasi ini tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Selanjutnya, Pemda juga diminta menjalankan inovasi pada sektor teknologi. Langkah itu dapat dilakukan dengan mengadopsi proses produksi yang inovatif melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. "Selain itu, para jajaran perangkat daerah juga bisa menciptakan inovasi sosial yang mencakup struktur budaya normatif atau regulatif guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang inklusif," pungkasnya.

• **Farid**

Kemendagri: Pemerintah Daerah Wajib Laporkan Inovasi yang Dilakukan



Berdasarkan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan provinsi maupun kabupaten dan kota untuk melaporkan setiap inovasi yang dilakukan kepada Menteri Dalam Negeri. Pelaporan inovasi dilakukan secara elektronik dengan mengakses situs Indeks Inovasi Daerah di alamat <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>. “Dengan sistem ini pelaporan inovasi menjadi *real time*, transparan, dan akuntabel. Pemda juga dapat mengaksesnya kapan saja,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Agus Fatoni pada

acara Webinar dan Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Kamis, 8 Juli 2021.

Selain diamanatkan undang-undang, lanjut Fatoni, kewajiban daerah untuk melaporkan inovasinya juga diatur pada Pasal 20 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang menyatakan bahwa penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, hasil inovasi yang telah dilaporkan tersebut akan dilakukan penilaian



“Nantinya provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal, daerah perbatasan, Papua dan Papua Barat yang memperoleh predikat sangat inovatif akan diberikan penghargaan *Innovative Government Award* oleh Mendagri. Selain itu, daerah akan diusulkan mendapat alokasi dana insentif daerah (DID)”

”

oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan variabel, indikator, dan metode pengukuran yang ditetapkan dalam indeks inovasi daerah,” kata Fatoni.

Dirinya berpesan dalam pengisian indeks, pemda diminta tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan penghargaan dan dana insentif daerah. Namun utamanya adalah agar tercipta budaya kerja yang inovatif dan kreatif di daerah. Sebab menurutnya, dalam situasi *double disruption* akibat revolusi industri 4.0 dan pandemi Covid-19, inovasi menjadi penting untuk dilaksanakan. Pemda di-

tuntut tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga berinovasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. “Pada tahun ini periode pelaporan inovasi daerah berlangsung dari Juni hingga 17 September 2021. Kami berharap semua pemda dapat segera melaporkannya,” pungkas Fatoni.

• Farid

KEMENDAGRI INGATKAN KEPALA DAERAH

AGAR TIDAK TAKUT BERINOVASI

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri), Agus Fatoni meminta kepala daerah untuk tidak perlu lagi takut dalam berinovasi. Pasalnya, amanat untuk berinovasi sudah didukung oleh regulasi yang lengkap, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kebijakan inovasi juga mendapat jaminan perlindungan hukum seperti yang diatur pada Pasal 389 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pasal itu menyebutkan, dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. Selain itu, pengaturan mengenai prinsip, bentuk, kriteria, dan mekanisme dalam berinovasi juga

sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

“Daerah jangan ragu untuk melahirkan, ide, gagasan dan inovasi. Asalkan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada, setiap inovasi tidak dapat dipidanakan,” ujar Fatoni saat menjadi pembicara virtual pada acara Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa 13 Juli 2021.

Semua landasan hukum tersebut, lanjut fatoni, dibuat agar inovasi dapat tumbuh pesat, sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing daerah. “Pada era sekarang, aparatur harus merubah pola pikir dan metode kerja. Jangan terjebak dalam rutinitas dan *business as usual*. Inovasi harus jadi budaya kerja yang baru,” pesan Fatoni.

Menurutnya, saat ini daerah perlu didorong untuk lebih giat menghasilkan inovasi. Hal ini karena adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan publik semakin berkualitas. “Pelayanan publik perlu dibuat lebih cepat, lebih pintar, lebih murah, lebih mudah, lebih baik, dan lebih nyaman,” kata Fatoni.

Dirinya menambahkan, inovasi yang dilakukan daerah juga untuk menjawab tren peningkatan pengguna seluler dan internet di Indonesia. Inovasi daerah yang agresif, selanjutnya akan mendorong peningkatan posisi Indonesia dalam *Global Innovation Index* dan *Global Competitiveness Index*.

“Oleh karena itu, inovasi bukan lagi suatu kewajiban, namun sudah harus menjadi kebutuhan. Saya harap daerah dapat terus memelihara ekosistem inovasinya,” pungkas Fatoni.

• Farid



Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni saat menjadi narasumber secara virtual dalam Agenda Webinar Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Evaluasi Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa, 13 Juli 2021

BADAN LITBANG KEMENDAGRI: FUNGSI KELITBANGAN DAERAH PERLU DIOPTIMALKAN, UNTUK PERKUAT INOVASI DAERAH



Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Acara Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 dan Hasil Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 secara virtual bersama Kepala Badan Litbang Kemendagri, A. Fatoni (13/07/2021)

Sebagai upaya untuk memperkuat inovasi di daerah, peran perangkat daerah yang menjalankan fungsi kelitbangan perlu dioptimalkan. Mengingat litbang daerah saat ini memiliki fungsi yang strategis dalam mengawal pelaksanaan kebijakan inovasi seperti melakukan verifikasi dan evaluasi atas inisiatif inovasi yang diusulkan. “Layak tidaknya usulan inovasi untuk diterapkan secara luas, ditentukan dari proses evaluasi yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan fungsi kelitbangan,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni saat menjadi pembicara pada acara Kebijakan Umum Indeks Inovasi Daerah 2021 dan Hasil Inovasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020, Selasa 13 Juli 2021.

Menurutnya, terdapat beberapa organisasi yang berperan penting dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Perangkat daerah dengan fungsi kelitbangan jadi salah satunya. Alasannya, litbang daerah memiliki peran untuk menghasilkan dan mengawal uji coba pelaksanaan kebijakan inovasi daerah. Hal ini agar ide dan terobosan kebijakan tersebut dapat efektif, efisien, dan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain mengawal pelaksanaan inovasi, litbang juga berperan sebagai lembaga *think tank* yang menyediakan kebijakan berbasis riset bagi kepala daerah. “Ekosistem inovasi harus dibangun, dan institusi kelitbangan berperan sentral untuk itu. Diharapkan melalui peran kelitbangan maka kemajuan IPTEK di daerah cepat terwujud,” ujar Fatoni.

Dengan berbagai peran sentral yang dimiliki, Fatoni berpesan agar kepala daerah terus berkomitmen mendukung penguatan kapasitas kelembagaan litbang daerah. “Saat ini banyak, litbang di daerah yang hanya berkedudukan di tingkat setara eselon III dan IV. Tentunya bila kelitbangan memiliki status kelembagaan setara eselon II, fungsi dan perannya akan lebih maksimal,” ujar Fatoni. Selain itu penguatan juga dapat dilakukan dengan menyediakan SDM fungsional tertentu yang mampu menjalankan fungsi kelitbangan, seperti peneliti dan analis kebijakan. “Litbang juga harus banyak melakukan kolaborasi antar aktor inovasi seperti universitas, lembaga *think tank independent*, masyarakat, dan pegiat inovasi lainnya,” pungkas Fatoni.

• Farid

babak baru REFORMASI BIROKRASI

Teks Farid Foto Pngimg.com



Perbaikan tata kelola pemerintahan memasuki era baru. Dengan tema bertajuk dynamic governance, reformasi birokrasi konsen untuk dapat memberi dampak secara langsung bagi masyarakat, serta didorong agar berkelas dunia. Sejumlah jajaran pemerintahan diminta bersiap dan bersungguh-sungguh menerapkan arah baru pembenahan birokrasi tersebut.

Bertempat di Sentul *Convention Center*, Kabupaten Bogor, usai dinyatakan terpilih untuk periode kedua, Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pertamanya dalam acara bertajuk Visi Indonesia. Presiden mengungkapkan pentingnya melakukan reformasi struktural pada lembaga-lembaga negara agar semakin sederhana, efektif, dan lincah. Langkah tersebut diyakini perlu ditempuh agar pelayanan masyarakat bisa lebih praktis dan tak memakan waktu. “Kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci untuk reformasi birokrasi kita,” ujar Presiden Joko Widodo, Minggu, 14 Juli 2019 yang disambut tepuk tangan para hadirin.

Pesan presiden tersebut menjadi penanda gaung reformasi birokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Sejak diterapkan pada 2010, reformasi birokrasi telah melalui perjalanan panjang dalam membenahi pelayanan publik. Merujuk pada pasal (4) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan operasional *grand design* reformasi birokrasi 2010-2025 termaktub dalam road map reformasi birokrasi yang ditetapkan setiap 5 tahun sekali. Ketentuan tersebut, secara teknis menjadikan periode *road map* reformasi birokrasi terbagi menjadi tiga, yakni tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.

Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) Eko Prasajo mengungkapkan, pada setiap perodenya, *road map* reformasi birokrasi memiliki fokus pembenahan yang berbeda. Pada periode pertama, tahun 2010-2014, perbaikan birokrasi konsen pada birokrasi berorientasi aturan (*rule based bureaucracy*). Fokus pembenahan tersebut menasar pada penguatan birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selain itu, pada fase tersebut dilakukan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pada periode kedua, konsentrasi perbaikan birokrasi bertumpu pada birokrasi berbasis performa (*performance based bureaucracy*), yakni penerapan hasil reformasi birokrasi yang mendorong peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia (SDM). Reformasi tersebut menekankan upaya melanjutkan keberhasilan dilakukan tahun 2010-2014 serta membenahi target yang belum terealisasi di tahun tersebut. Eko menambahkan, pada periode ketiga atau tahun 2020-2024, ikhtiar menyempurnakan pelayanan publik menitikberatkan pada bentuk birokrasi yang dinamis (*dynamic governance*). Reformasi birokrasi itu mendorong agar dilakukan peningkatan kapasitas birokrasi mengacu pada tujuan akhir, yakni mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. “*Road map* reformasi birokrasi

ini untuk menciptakan birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan birokrasi yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” katanya.

Berbeda dengan periode sebelumnya, kata Eko, *dynamic governance* memiliki tiga ciri utama, yaitu kapabilitas, budaya, dan kebijakan yang adaptif. Faktor kapabilitas diyakini akan menghasilkan individu yang mampu menyelesaikan pekerjaannya, serta memuat proses kerja yang lincah. Sedangkan pada aspek budaya diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi, meritokrasi, pertumbuhan, dan kecermatan pasar. Dirinya menambahkan, pada ciri ketiga, yakni kebijakan yang adaptif dinilai akan melahirkan proses yang juga bisa menyesuaikan kondisi lingkungan. Eko menekankan, dibandingkan teknologi dan proses, manusia dan budaya memiliki peran paling sentral dalam upaya membenahi birokrasi. Sebab, dengan fokus pada pembenahan manusia dan budaya juga akan menghasilkan kompetensi, perilaku, nilai dasar, integritas yang lebih profesional.

Eko menyoroti, secara umum kondisi perkembangan administrasi publik di Indonesia masih berkatut pada *governance* 1.0, di mana budaya pelayanan publik relatif masih berorientasi pada otoritas, kewenangan, serta tugas dan fungsi. Sehingga, perlu dilakukan reformasi birokrasi yang optimal untuk dapat melompat ke jenjang *governance* 4.0. “(Kita bisa menuju ke *governance* 4.0) dengan memanfaatkan momentum perubahan yaitu globalisasi, digitalisasi, dan milenialisasi,” terang Eko dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (PPRB Pemda) 2021, Rabu, 9 Juni 2021.

Dirinya menilai, dalam situasi pandemi Covid-19 serta zaman yang serba digital, penting bagi segenap *stakeholder* untuk membangun pelayanan publik berbasis *governance* 4.0. Lantaran, reformasi tata kelola pemerintahan tersebut memuat lima unsur yang diyakini memudahkan pelayanan publik, di antaranya pengaturan kerja yang relatif tidak kaku (*flexible working arrangements*). Pada ciri tersebut, ruang dan waktu kerja diatur lebih luwes, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada publik, tidak perlu terpa-ku dengan waktu yang lama serta melakukan pekerjaan di kantor. “Ini sudah kita terapkan selama 1,5 tahun terakhir, di mana kita bekerja *work from home*,” ujarnya.

Eko melanjutkan, di dalam *governance* 4.0 memuat *super application*, yakni *platform* pemerintahan yang mendorong penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Di dalam aturan tersebut, pelayanan publik dilakukan melalui aplikasi, sehingga proses pelayanan lebih praktis dan turut mendorong rasionalisasi aparatur sipil negara.

... laporan utama

Selain itu, dirinya mengungkapkan pada ciri ketiga, bentuk reformasi birokrasi mengatur tentang *capacity building*. Unsur tersebut menjadikan aparatur sipil negara memiliki bekal kompetensi di dunia digital. Selanjutnya, *talent management*, yakni membentuk manajemen talenta berbasis nasional yang memungkinkan aparatur sipil negara memiliki sistem karier terbuka. Sedangkan ciri berikutnya, kata Eko, ialah tata kerja. Unsur tersebut memungkinkan rekayasa proses bisnis diterapkan menggunakan teknologi IT dan penyederhanaan struktur dilakukan mengacu pada digitalisasi.

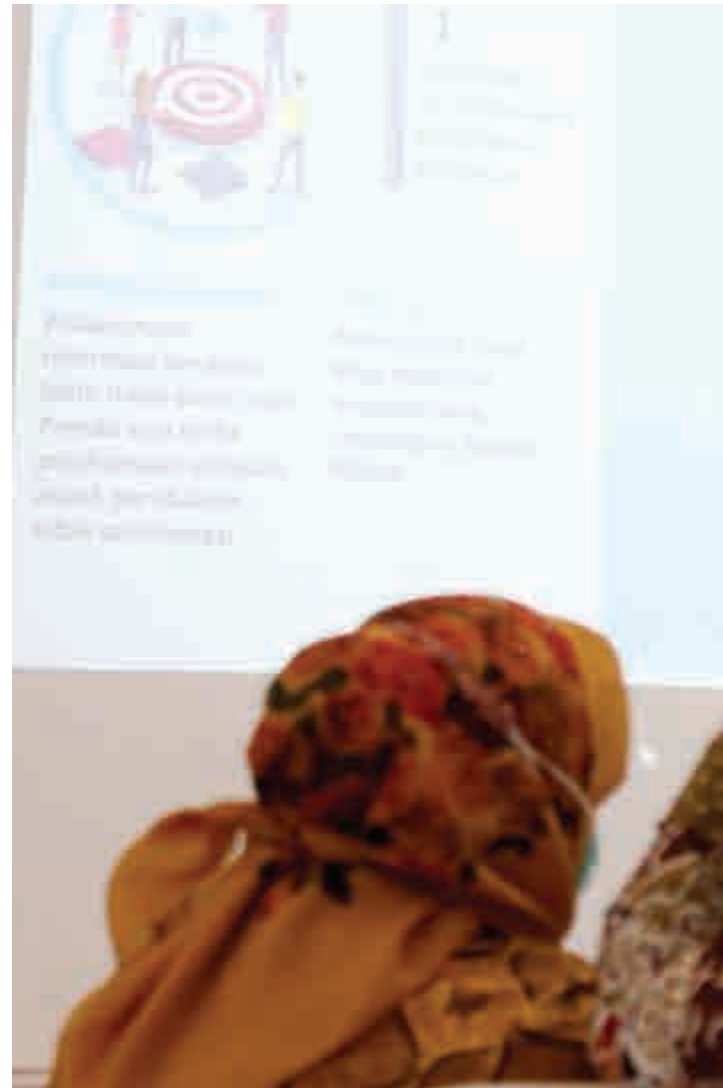
Di sisi lain, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto mengatakan pada *roadmap grand design* reformasi birokrasi tahun 2020-2024, Kementerian-PANRB tengah melakukan penajaman. Langkah tersebut ditempuh guna mempercepat proses reformasi birokrasi serta menyelaraskan program perbaikan pelayanan publik agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

Proses penajaman tersebut, lanjut Erwan, dilakukan dengan memperbaiki tujuan, sasaran, indikator keberhasilan. Selain itu, dilakukan penyesuaian agar kegiatan utama reformasi birokrasi menjadi lebih fokus, konkret, dan berdampak. Dirinya menambahkan, *refocusing* tersebut juga dilaksanakan dengan menetapkan sasaran pada kegiatan reformasi birokrasi yang bersifat tematik, yaitu kegiatan pembenahan pelayanan publik dalam rangka mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Erwan menjelaskan, setidaknya terdapat tiga sektor yang diusulkan dalam rangka mempercepat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain UMKM, investasi dan kemudahan perizinan usaha, serta pembangunan pariwisata. “Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik ini akan melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang menjadi *leading institution* dalam setiap sektor prioritas,” jelas Erwan.

Dirinya menambahkan, pada periode saat ini, reformasi birokrasi bersifat substantif, implementatif, inklusif, dan kolaboratif. Sifat substantif dimaksudkan agar perbaikan dilaksanakan untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan permasalahan paling utama di dalam birokrasi. Hal tersebut dikatakannya selaras dengan gambaran yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. “Bapak Wakil Presiden seringkali menganalogikan dengan ‘garuk yang gatal’. Maksudnya adalah selesaikan yang paling menjadi permasalahan. Dengan prinsip ini, reformasi birokrasi menjadi lebih berdampak untuk mengurai akar permasalahan yang sebenarnya,” terangnya.

Selain itu, ia menambahkan sifat implementatif di dalam reformasi birokrasi memiliki arti jika program dan kegiatan yang dilakukan harus dirancang secara baik dan terperinci, sehingga pelaksanaannya berjalan efektif. Sedangkan sifat inklusif



menyiratkan bahwa dalam penyusunan *road map* dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, berbagai pemangku kepentingan di luar birokrasi turut dilibatkan, seperti akademisi, pakar dari berbagai bidang, perwakilan politisi, perwakilan pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat. Pelibatan tersebut secara konkret diakomodir dalam bentuk identifikasi masalah terkait birokrasi yang sering mereka hadapi, sekaligus ekspektasi atas profil birokrasi yang diinginkan.

“Sedangkan unsur kolaboratif, berarti pelaksanaan reformasi birokrasi melibatkan kerja sama dan sinergi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar lebih efektif dan efisien serta menekan *silos mentality*,” terangnya.

Erwan mencatat, selama lima tahun terakhir pelaksanaan reformasi birokrasi, berbagai pencapaian



Para pegawai Badan Litbang Kemendagri sedang mengikuti acara Sosialisasi Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Litbang Kemendagri, Senin 19 April 2021.

berhasil ditorehkan. Di antaranya, penyederhanaan 41.272 struktur terhadap 91 kementerian/lembaga, pembubaran dan pengintegrasian 27 lembaga nonstruktural pada kementerian/lembaga yang sesuai, dan pencapaian 82 persen tata kelola berbasis SPBE pada kementerian. Selain itu, juga berhasil diperoleh 45 jabatan fungsional baru (berdasarkan keahlian), 124 usulan jabatan fungsional baru, dan terdapat total 245 jabatan fungsional pada tahun 2020 sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi.

“Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3 tahun terakhir berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar kurang lebih 112 triliun. Serta telah terbentuk 1516 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi, termasuk pada sektor penegak hukum. Di samping itu program reformasi birokrasi telah terkonsolidasi dalam kegiatan strategi nasional pencegahan korupsi (STRANAS PK),” jelasnya.

Reformasi Birokrasi di Kemendagri

Sementara itu, sebagai salah satu kementerian yang berperan sebagai *leading sector* terselenggaranya reformasi birokrasi nasional, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus

melakukan optimalisasi pembenahan pelayanan publik. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori menargetkan dalam pelaksanaan indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dan 2021, Kemendagri dapat mencapai angka 85,01 dan 87,01. Dengan angka tersebut, Kemendagri masuk pada kategori A. Dengan demikian, capaian-capaian tersebut dapat berkontribusi pada tunjangan kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kemendagri sebesar 100 persen. Apalagi, target tersebut sejalan dengan *road map* reformasi birokrasi yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) Kemendagri Tahun 2020-2024.



Agar target-target tersebut tercapai, Hudori membeberkan sejumlah strategi yang perlu dilakukan. Dirinya meminta agar Tim Reformasi Birokrasi pada Tahun 2021 lebih fokus pada tugas yang diembannya. Selain itu, pimpinan dan ASN di Kemendagri diminta agar memiliki rasa percaya dan komitmen satu sama lain. “Juga diperlukan penilaian yang optimal pada kelompok kerja serta satuan kerja secara komprehensif dan terukur,” ujarnya saat membuka *Talk Show* Internalisasi Reformasi Birokrasi Kemendagri, Senin, 12 April 2021.

Hudori menyebutkan, untuk dapat mencapai indeks reformasi birokrasi sesuai dengan yang ditargetkan, serta berdampak pada kesejahteraan ASN Kemendagri, diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja. Langkah

tersebut juga perlu ditunjang dengan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Selain itu, lanjut Hudori, koordinasi antar kelompok kerja dan satuan kerja yang selalu aktif, responsif, dan berkesinambungan juga diperlukan. Hal tersebut juga perlu ditambah dengan membuka pemikiran baru *best practice* kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna meningkatkan reformasi birokrasi di Kemendagri.

Hudori juga membeberkan capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2015-2019. Hampir setiap tahunnya, capaian indeks reformasi birokrasi mengalami peningkatan. Tahun 2015, misalnya, reformasi birokrasi Kemendagri memperoleh angka 68,82 atau berada pada kategori B. Di mana pencapaian tersebut turut men-

dorong tunjangan kinerja sebesar 70 persen. Tahun 2016, indeks reformasi birokrasi memperoleh angka 69,21 persen berkategori B. Pencapaian tersebut, juga berdampak pada tunjangan kinerja sebanyak 70 persen.

Selain itu, pada 2017, Kemendagri mendapat angka 75,03 atau berkategori BB. Dengan hasil tersebut, didapatkan tunjangan kinerja sebanyak 80 persen. Sedangkan pada 2018, indeks reformasi yang diperoleh 75,02 atau berkategori BB. “Tahun 2019, dengan indeks reformasi birokrasi 75,43 atau berkategori BB berkontribusi terhadap tunjangan kinerja sebesar 80 persen,” ujarnya.

Hudori mengungkapkan, pelaksanaan reformasi birokrasi tidak semata ditujukan pada perolehan indeks reformasi birokrasi yang telah



ditetapkan dalam renstra. Melainkan hal tersebut membuktikan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik. Dirinya juga mendorong agar segenap komponen unit kerja membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Ia menambahkan tahun 2020, 3 unit kerja Kemendagri berhasil mendapatkan WBK dan WBBM, dengan rincian dua pada Ditjen Dukcapil, serta satu lainnya di Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. Hudori menuturkan, ke depan Kemendagri bakal menargetkan 72 unit memperoleh WBK dan WBBM. “Oleh karenanya, Rapat Internalisasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendagri Tahun 2021, menjadi rapat intermediasi birokrasi Kemendagri tahun

2021. Ini dapat menjadi pijakan awal untuk mewujudkan target indeks reformasi birokrasi,” katanya.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Senada dengan target peningkatan capaian reformasi birokrasi di Kemendagri, Hudori mengatakan pemerintah daerah juga diminta untuk menunjang perolehan reformasi birokrasi. Dirinya mengapresiasi hasil pencapaian pemerintah daerah dengan kategori B ke atas, yang dicapai pada tahun 2020 lalu. Lantaran, sejumlah pemerintah provinsi menunjukkan peningkatan signifikan dari yang ditargetkan. Di mana, semula direncanakan sekitar 17 provinsi atau sekitar 50% target dapat dipenuhi. Namun, realisasinya justru melebihi target. “Indeks reformasi birokrasi

di tingkat provinsi tahun 2020 telah melampaui batas. Di mana provinsi yang mendapatkan nilai B ke atas berjumlah 27 provinsi atau sekitar 79,41 persen. Saya mengapresiasi setiap provinsi yang telah mendapatkan nilai itu,” ujar Hudori.

Sementara itu, Eko menilai, peran sentral pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan reformasi birokrasi memberikan dampak yang signifikan. Karena, upaya-upaya tersebut juga meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi menyeluruh secara nasional. Dirinya meminta agar pemerintah daerah lebih fokus dalam mereformasi tata pelayanan di daerahnya. Hal itu demi menunjang pencapaian skor reformasi birokrasi secara nasional.

• **Farid**

BENAHI BIROKRASI DENGAN INOVASI

Teks Farid Foto Freepik

Bergulirnya reformasi birokrasi pada periode baru road map tahun 2020-2024 ditanggapi Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri dengan melakukan sejumlah gebrakan. Sejumlah perbaikan pelayanan tengah dikaji untuk diterapkan, terutama tentang bagaimana mendorong kemudahan dalam melayani publik melalui inovasi. Diharapkan cara-cara tersebut mampu mendongkrak kinerja aparatur menjadi lebih efektif dan efisien.

Senin, 19 April 2021 menjadi hari tak biasa di lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Bertempat di aula, sejumlah pejabat struktural dan fungsional tampak hadir mengikuti rapat bertajuk “Sosialisasi Reformasi Birokrasi”. Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni dalam paparannya mengatakan reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Terutama, dalam hal yang menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur.

Menurut Fatoni, berbagai kendala yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan optimal harus ditata ulang. Kendala tersebut dinilainya dapat diselesaikan menggunakan pendekatan reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),” ujarnya ketika menjadi pembicara kunci dalam acara tersebut.

Ia menambahkan, penting bagi segenap aparatur negara agar memiliki kesadaran dalam reformasi birokrasi. Lantaran kesadaran tersebut nantinya dapat mendorong langkah strategis guna membentuk sumber daya manusia (SDM) berdaya guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Fatoni menekankan, era kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan menuntut semua pihak untuk bertransformasi. Terlebih, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memaksa untuk dilakukan pembenahan menyesuaikan konteks zaman.

“Kita harus segera mengambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kurniasih mengatakan Badan Litbang Kemendagri senantiasa berkomitmen mendorong penerapan reformasi birokrasi. Dirinya optimistis, apa yang ditargetkan Sekretaris Jender-



al Kemendagri, Muhammad Hudori bahwa Kemendagri memperoleh kategori A pada indeks reformasi birokrasi tahun 2020 dan 2021 dapat terlaksana. Lantaran, di lingkup Badan Litbang Kemendagri sendiri saat ini telah dilakukan banyak perbaikan signifikan. “Hal yang paling menonjol sendiri bisa kita lihat seperti di pusat-pusat di mana aparturnya nyaris tidak ada yang pulang sore. Ini menandakan etos kerja telah melekat di dalam diri kita,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, komitmen perbaikan tata kelola pelayanan publik juga terlihat dengan diterapkannya Unit Layanan Administrasi (ULA) di seluruh komponen Kemendagri. Di Badan Litbang Kemendagri sendiri, catat Kurniasih, sistem tersebut telah membantu pendataan administrasi tamu lebih rapi dan efektif. Lantaran, dalam berbagai kunjungan dapat dipantau dan diperkirakan, sehingga langkah tersebut dinilai turut mengurangi pertemuan-pertemuan yang tidak perlu.

Selain itu, Kurniasih memaparkan kondisi pandemi

Covid-19 juga menyiratkan reformasi birokrasi telah dilakukan dengan baik. Lantaran, berbagai kebijakan seperti *work from home* (WFH) dapat dilaksanakan. “Covid-19 mengajarkan kita, kita tidak perlu datang ke kantor, tapi kita tetap bisa melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan misi utama organisasi,” terang Kurniasih.

Menurut Kurniasih, ke depan reformasi birokrasi membutuhkan perhatian yang besar pada sisi area penataan sistem manajemen SDM aparatur. Aspek tersebut dinilainya lebih perlu diterapkan, mengingat upaya itu yang dapat menentukan kerja-kerja kelitbang berjalan lebih profesional. Dirinya mencontohkan, dalam hal penelitian, dengan SDM yang mumpuni maka akan turut menghasilkan berbagai kajian dan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis. Apalagi, saat ini Badan Litbang Kemendagri kerap diminta memberikan hasil-hasil kajian dan perumusan kebijakan oleh Menteri Dalam Negeri. “Hal ini menunjukkan bahwa dengan SDM kita telah berhasil meningkatkan marwah Badan Litbang Kemendagri untuk semakin dipercaya,” tambahnya.

Rencana kerja

Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sisdur Serta Evaluasi Kinerja ASN (PJKSE), Abas Supriyadi mengatakan untuk menyongsong reformasi birokrasi tahun 2021, saat ini dilakukan penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Penyusunan tersebut melibatkan tim pelaksana reformasi birokrasi sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 060-167 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Litbang Kemendagri. Namun proses penyusunan sendiri saat ini masih berjalan.

“Rencana kerja reformasi birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021 untuk saat ini masih dalam proses penyempurnaan dan akan segera dibahas bersama dengan tim pelaksana reformasi birokrasi. Tahapan selanjutnya akan disahkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,” katanya.

Dirinya melanjutkan, secara umum rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2021 dan tahun 2020 tidak jauh berbeda. Hanya saja, terdapat perbaikan dan pengembangan di beberapa area perubahan, seperti penataan dan penguatan organisasi. Penguatan itu tercermin dengan dilakukannya evaluasi nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri. “Selain itu akan segera diterapkan *e-office* di lingkungan Badan Litbang guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” terangnya.

Ia menambahkan, guna menunjang penerapan reformasi birokrasi, Badan Litbang Kemendagri membentuk dua *quick wins*. *Quick wins* tersebut diharapkan dapat memicu momentum awal yang positif sebelum melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan. Pada

2021 sendiri, *quick wins* yang diusulkan adalah peningkatan jumlah pemerintah daerah inovatif. Selain itu juga penerapan aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah).

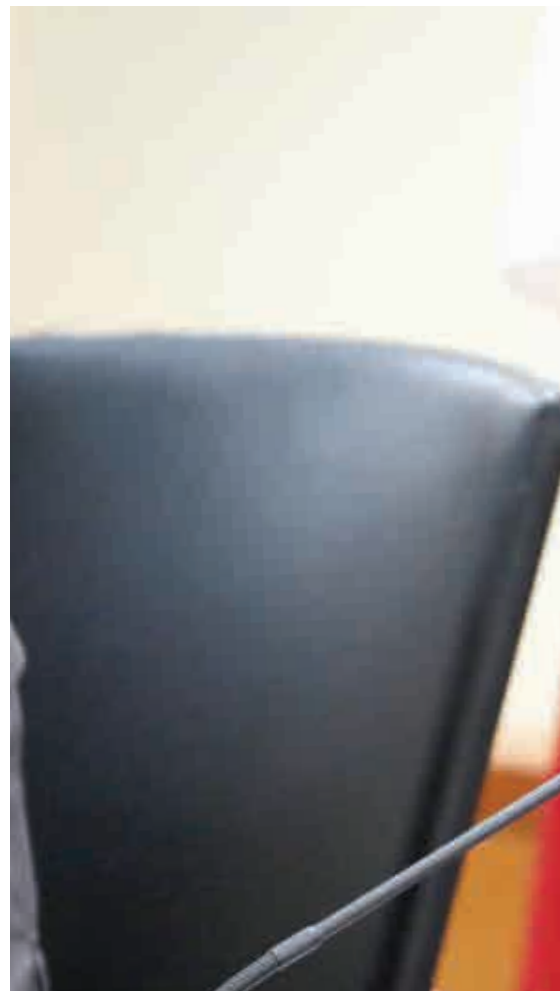
Esensi reformasi birokrasi

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Badan Litbang Kemendagri, Mohammad Noval menilai substansi dari pelaksanaan reformasi birokrasi sejatinya terletak pada komitmen semua pihak, mulai dari pimpinan, hingga di level staf. Ia mengingatkan bahwa upaya menerapkan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi kewajiban para ASN, melainkan pramuhakti. Lantaran, bentuk kesadaran tanggung jawab tersebut yang akan mendorong terlaksananya reformasi birokrasi.

Menurut Noval, bentuk implementasi reformasi birokrasi sejatinya tidak hanya sebatas pada pemenuhan administrasi. Upaya tersebut bisa dilakukan dengan menyisipkan agenda reformasi birokrasi pada setiap program kerja yang dilakukan. Ia mencontohkan, dalam hal sosialisasi reformasi birokrasi seharusnya tidak perlu dilakukan secara terpisah, melainkan dapat dimasukkan ketika pada saat rapat.

“Dalam sosialisasi misalnya bisa kita selipkan isu-isu reformasi birokrasi di setiap rapat. Nah tapi itu kan perlu disampaikan hasil *evidence*-nya, misalnya ada suara rekamannya atau foto-foto saat penyampaian. Atau ketika ada momen tertentu, kita selipkan di paparan rapat mengenai reformasi birokrasi, jadi kita tidak perlu waktu khusus untuk sosialisasi reformasi birokrasi itu,” terangnya.

Ia menambahkan, guna menunjang penilaian reformasi birokrasi, Badan Litbang Kemendagri dapat memaksimalkan produk inovasi dari setiap program kerja yang dilaksanakan. Hal itu seperti inovasi di dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daer-



ah (IPKD), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), serta Indeks Inovasi Daerah. Produk inovasi di dalam program tersebut, kata Noval, di sisi lain juga akan mendorong kemudahan dalam melaksanakan pelayanan tata kelola pemerintahan.

Di sisi lain, dalam konteks menuju reformasi birokrasi berbasis *dynamic governance*, Noval menyarankan agar tidak melakukan tugas yang terlampau jauh. Saat ini segenap *stakeholder* dapat memfokuskan diri pada implementasi tugas dan fungsi kelitbang. Lantaran, langkah itu akan mampu memperkuat unit kerja eselon lainnya, sekaligus menjadi fasilitator litbang di daerah lebih kuat. Sementara itu, ihwal bentuk anggaran reformasi birokrasi Noval mengungkapkan, anggaran tersebut melekat pada kegiatan-kegiatan yang memuat reforma-



Sekretaris Badan Litbang Kemendagri, Kumiasih saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion Model Inovasi Pelayanan Pemerintah Daerah dalam Mitigasi Bencana Tahun 2021, Jumat 9 April 2021.



Mohammad Noval
Kepala Bagian Perencanaan
Badan Litbang

si birokrasi. Hal itu dilakukan demi menjalankan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kerja-kerja reformasi birokrasi.

Noval berharap, komitmen dan kerja sama semua pihak dapat dilakukan sebagai upaya menunjang reformasi birokrasi. Lantaran, jika hal itu telah bisa dicapai, maka program-program kerja akan berjalan dengan sendirinya. “Bahkan akan ada pembaruan-pembaruan inovasi itu. Kalau semangat, komitmen, dan motivasi itu terbangun kan kita ini akan jalan semua,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah, Matheos Tan mengungkapkan dalam menunjang penerapan reformasi birokrasi, semua pihak tidak bisa bekerja secara biasa. Perlu dorongan kuat agar kinerja terlaksana dengan transparan,

jujur, dan akuntabel. Dirinya menambahkan, terkait pengembangan SDM, Puslitbang Inovasi Daerah telah memiliki beragam sumber daya yang dapat menunjang kinerja lebih baik. “Kalau SDM, banyak peneliti kami yang juga berperan sebagai pengajar di BPSDM Kemendagri,” katanya saat ditemui di ruangannya.

Ia menambahkan, dirinya berterima kasih atas diajukannya aplikasi pusat jejaring inovasi daerah (Puja Indah) dalam menunjang skor reformasi birokrasi. Hal tersebut menjadikannya stimulus untuk meningkatkan kinerja. “Saya rasa Puja Indah ini menjadi salah satu cara untuk membuat segala urusan lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.

• Farid

ATUR PEMBENAHAN PELAYANAN, CAPAI PENGHARGAAN

Sejumlah instansi pemerintah melakukan gebrakan signifikan demi mendorong terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan mereka. Berbagai langkah yang diterapkan itu menghasilkan pencapaian gemilang, yakni diraihnya predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Seperti apa kiprah mereka?

Sejak tahun 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ham) telah mengimplementasikan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Implementasi itu selaras dengan *road map* reformasi birokrasi Balitbang Hukum dan Ham serta rencana kerja tahunan reformasi birokrasi sejak tahun 2010 sampai sekarang. Kepala Balitbang Hukum dan Ham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan upaya penerapan reformasi birokrasi di Balitbang Hukum dan Ham diperkuat dengan Permenkumham Nomor M.HH-19.OT.03.01 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2020-2024.

Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi juga ditunjang dengan keberadaan tim kelompok kerja (Pokja). Pokja tersebut dibentuk berdasarkan kriteria: integritas, pemahaman agen perubahan, pembangunan zona integritas, loyalitas pada organisasi, tanggung jawab, kerja sama untuk mengetahui komitmen dan pola pikir menuju perubahan kemajuan organisasi. Tim tersebut beserta pimpinan tinggi madya dan pertama kemudian menyusun rencana prioritas dan rencana kerja delapan area perubahan yang berkesinambungan, yang

memuat tindak lanjut atas rekomendasi dari Kementerian PANRB dan Inspektorat Jenderal Hukum dan Ham. Rencana kerja tersebut, juga disusun linier dengan *road map* reformasi birokrasi Balitbang Hukum dan Ham yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan No. PPH-338.OT.03 Tahun 2020 tentang *Road Map* Balitbang Hukum dan Ham 2020-2024.

“Seluruh rencana kerja kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan dan hasil evaluasinya kemudian ditindaklanjuti dalam rangka mengukur kualitas mutu dan target yang telah ditentukan agar tepat sasaran serta dapat memberikan rekomendasi peningkatan



Sri Puguh Budi Utami
Kepala Badan Litbang
Kemenkumham

tan kinerja pada bulan berikutnya sesuai tujuan yang diharapkan,” ujar Utami.

Dirinya menambahkan, di antara 8 area perubahan, area manajemen perubahan menjadi fundamental karena berkaitan langsung dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai. Menurut Utami, di titik tersebutlah pimpinan berperan sebagai role model dalam memberikan dukungan kepada agen perubahan. Selain itu, dilakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala setiap bulan dan triwulan terhadap pegawai melalui kegiatan *Coaching* dan *Mentoring*.

Utami mengatakan, berkat upaya yang signifikan, Balitbang Hukum dan Ham memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Pencapaian tersebut diraih pada akhir 2019 setelah selama dua tahun dilakukan upaya yang meningkatkan indeks PMRB. Dirinya menilai, perolehan predikat tersebut tidak lepas dari komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai guna mewujudkan Balitbang Hukum dan Ham sebagai Satuan Kerja (Satker) berpredikat WBK/WBBM.

Upaya berikutnya ialah menetapkan enam layanan publik sesuai *core* bisnis Balitbang Hukum dan Ham sebagai dasar kebermanfaatannya atas hasil-hasil penelitian dan pengembangan. Hal itu antara lain, layanan penelitian/kajian, narasumber (konsultasi), e-book, e-journal, dan perpustakaan. “Pada pertengahan tahun 2020 kami menambah dan menetapkan layanan keenam yaitu Obrolan Peneliti (OPini). Masyarakat bisa mengakses layanan tersebut di website www.balitbangham.go.id,” terang Utami.

Dirinya menuturkan, langkah lainnya yang dilakukan ialah membangun budaya kerja dan integritas individu. Selain itu, dibangun pula integritas organisasi dengan melakukan pemetaan risiko terhadap terca-

paianya tujuan organisasi, serta pemetaan risiko terhadap pengelolaan anggaran. Dengan ikhtiar tersebut, celah-celah yang memungkinkan terjadinya korupsi diyakini dapat diminimalisir. Di samping itu, kata Utami, pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pegawai teladan dan pelaksana pemberi layanan publik Balitbang Hukum dan Ham. Serta melakukan penguatan pada area manajemen perubahan, penguatan pengawasan, akuntabilitas, tata laksana dan manajemen SDM.

Sebagai langkah menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Balitbang Hukum dan Ham mengembangkan sistem aplikasi survei persepsi anti-korupsi dan kepuasan masyarakat (3AS). Saat ini aplikasi tersebut telah direplikasi oleh 9 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian PANRB, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR-BPN, Kementerian ESDM, Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Pemprov DKI Jakarta. Dirinya menambahkan, Balitbang Hukum dan Ham juga mengembangkan aplikasi SIPKUMHAM, yang memuat pemetaan masalah hukum dan HAM serta pelayanan publik Hukum dan Ham dari media nasional sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pimpinan unit kerja.

Pasca merebaknya Pandemi Covid-19 di tahun 2020, Utami mengatakan pihaknya melakukan penyesuaian proses kerja menjadi *work from home*. Hal itu diakuinya tidak mudah dan membutuhkan waktu. Namun, kondisi tersebut dapat diatasi dengan pelan-pelan memberlakukan kegiatan secara daring. Bahkan, dengan situasi tersebut, Balitbang Hukum dan Ham membuat terobosan OPini di mana penelitian dan kajian disebarluaskan melalui zoom dan youtube.

Pada 2021 ini, Utami mengatakan akan melakukan strategi khusus. Di antaranya melakukan penguatan terhadap mindset pegawai melalui *coaching* dan *mentoring* terkait tu-

gas pokok dan fungsi secara berkala pada unit teknis/sekretariat. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan pada jejaring, sebagai langkah mensosialisasikan hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan litbang. “Kami juga berupaya meningkatkan publikasi hasil penelitian melalui kegiatan Obrolan Peneliti (OPini) yang dilaksanakan di 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya.

•••

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Indra Gunawan mengungkapkan pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga eksistensi organisasi sesuai dengan yang diharapkan. Dirinya mengatakan, penerapan reformasi birokrasi pada Ditjen Bina Adwil mulai optimal dilaksanakan tahun 2014 dengan berpedoman pada *road map* reformasi birokrasi Kemendagri. Namun, pada awal pelaksanaannya dinilai cukup menantang, lantaran hal tersebut masih terasa baru bagi segenap pegawai. “Untuk itu perlahan kita mulai dari area mendasar di reformasi birokrasi ini yaitu manajemen perubahan,” ujar Indra.

Perubahan cara pandang dan budaya kerja seluruh pegawai menjadi fokus utama pembenahan tersebut. Hal itu ditunjang dengan keteladanan perilaku dari pimpinan. Langkah tersebut diyakini dapat mendorong pegawai di bawahnya untuk mencontoh sikap dari pimpinan. Selain itu, dibentuk pula agen perubahan sebagai pelopor reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerja. Agen tersebut bertanggung jawab untuk mempromosikan keteladanan dalam melaksanakan peran, tugas, dan fungsinya.

Indra mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Bina



Adwil pada rentang 2015-2017 masih bersifat prosedural. Di mana fokus utamanya adalah nilai-nilai reformasi birokrasi yang diinternalisasikan dalam unit kerja melalui sosialisasi dan penguatan tim kerja reformasi birokrasi dan dokumen evidence yang harus dipenuhi. Namun pada 2018-2021 kesadaran aparatur sipil negara (ASN) terhadap reformasi birokrasi mulai tinggi. Terdapat beragam inovasi yang dihasilkan melalui penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi. Di antaranya, Pohon kinerja, Peta Proses Bisnis, Peta risiko, mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis lingkup Adwil, mendapatkan predikat ISO SMAP 37001:2016. Selain itu, salah satu unit kerja di sana juga memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Selain itu juga Ditjen Bina Adwil menginisiasi pembentukan 4 jabatan fungsional tertentu (JFT), sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi.

si. Indra melanjutkan, berdasarkan evaluasi internal Ditjen Bina Adwil, terdapat enam area yang memenuhi kriteria. Antara lain, manajemen perubahan, akuntabilitas kinerja, penguatan kelembagaan, penataan perundang-undangan, pengawasan dan pelayanan publik. “Dari area tersebut, akuntabilitas telah memberikan kontribusi secara signifikan,” terangnya.

Dirinya menambahkan, pencapaian salah satu unit di Ditjen Bina Adwil dalam memperoleh predikat Zona Integritas bermula sejak 2019 lalu. Saat itu, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah diusulkan untuk maju sebagai unit pembangunan Zona Integritas. Namun, hal itu gagal dalam tahap expose terakhir. Berkaca dari hal tersebut, dilakukan evaluasi yang menyeluruh untuk dapat mengikuti penilaian ZI pada tahun 2020.

Berbagai cara dilakukan, antara lain, membentuk tim kerja Zona Integri-

tas pada masing-masing unit kerja. Selain itu dibentuk pula rencana aksi dan rencana anggaran pembangunan zona integritas unit kerja. Indra menambahkan, pihaknya juga mulai memperbaiki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. “Dengan didukung komitmen pimpinan dan seluruh aparatur negara, Ditjen Bina Adwil berhasil mengantarkan Direktorat tersebut sebagai unit kerja Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK),” jelasnya.

Indra menilai, tantangan utama dalam menerapkan reformasi birokrasi terletak pada pola pikir dan budaya kerja pegawai yang masih membutuhkan dorongan yang besar. Padahal tuntutan organisasi agar semakin modern, responsif, dan berdaya guna semakin tak terelakkan. Untuk itu ia mengajak seluruh komponen untuk menciptakan inovasi yang mampu mendukung kinerja serta melak-



sanakan fungsi-fungsi strategis.

Untuk mencapai target reformasi birokrasi tahun 2021, lanjut Indra, Ditjen Bina Adwil akan melakukan pengelolaan akuntabilitas kinerja, pemanfaatan e-government, dan penerapan SPIP dan tata laksana. Langkah tersebut dapat dicapai dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan pengukuran keberhasilan kinerja yang telah terstandardisasi.

“Selain itu juga akan dilakukan perbaikan SOP sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, optimalisasi e-government dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik baik internal Ditjen Bina Adwil maupun Satker Pemerintah Daerah yang menjadi binaan Ditjen Bina Adwil,” pungkasnya.

•••

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Akhmad Sudirman Tavipiyono mengatakan terdapat lima strategi dalam membangun Zona Integritas. Pertama adalah komitmen pimpinan dan semua karyawan, di mana hal tersebut diyakini akan menularkan semangat dan visi melaksanakan reformasi birokrasi. Berikutnya adalah kemudahan layanan. Aspek ini diperuntukan untuk memberikan pelayanan publik lebih optimal. Selain itu, diperlukan program yang menyentuh langsung ke masyarakat. Kemudian monitoring dan evaluasi, langkah ini dicapai untuk memastikan program yang dijalankan tetap pada jalurnya. Terakhir, manajemen media.

“Penting juga untuk menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi yang telah dilakukan diketahui masyarakat,” ujar Tavip.

Dirinya menambahkan, Dukcapil mulai melakukan perubahan signifikan demi menunjang reformasi birokrasi. Hal itu dimulai pada Juli 2015 hingga Desember 2020. Pada area manajemen perubahan, misalnya, dalam periode tersebut telah membentuk Gerakan Sadar Admin-duk, hingga membentuk Dukcapil Go Digital. Dengan ikhtiar tersebut, diketahui terjadi perubahan pola pikir dan komitmen yang dimotori langsung oleh Dirjen Dukcapil beserta unsur pimpinan. “Langkah tersebut telah menggerakkan perubahan pada unsur Dukcapil di 514 kabupaten/kota dan 24 provinsi serta masyarakat di seluruh Indonesia,” katanya.

Dirinya menambahkan, perbaikan juga menyentuh area penataan tata laksana. Pada area tersebut, dilakukan perubahan signifikan, di antaranya penggunaan teknologi, penyempurnaan regulasi, serta perbaikan layanan. Tavip menambahkan, dalam perubahan layanan misalnya dokumen kependudukan bisa menggu-

nakan kertas putih HVS 80 gram. Langkah tersebut dinilai telah menghemat 450 miliar per tahun.

Selain itu, dirinya mengatakan Ditjen Dukcapil juga menata sistem manajemen SDM. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM. Hal itu juga ditunjang dengan peningkatan kualitas SDM, serta mendorong ketaatan dan disiplin SDM. Di samping itu, pada area pengawasan juga dilakukan upaya-upaya preventif. Seperti penanganan gratifikasi, pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 6 satuan kerja, sebagai *integrity island*. “Juga menerapkan SPIP dan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR,” terangnya.

Tavip menambahkan, perubahan area akuntabilitas juga dilakukan. Di antaranya melakukan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, melaporkan monitoring dan evaluasi setiap triwulan, laporan keuangan, dan perjanjian kinerja eselon I sampai dengan IV. Sedangkan pada area pelayanan publik, berbagai perbaikan telah dilakukan, diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah. Hal itu terlihat dengan diperbolehkannya menggunakan kertas putih pada layanan administrasi kependudukan. Selain itu, sistem pelayanan juga berbasis *online*.

Di samping itu, perbaikan juga menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Antara lain, dibentuknya ULA, terintegrasi SI-OLA Kemendagri, dan penanganan pengaduan masyarakat. Berkat perubahan itu pula, Ditjen Dukcapil memperoleh peningkatan kepuasan masyarakat. Hal tersebut didapat pada layanan ULA, penghargaan dari luar negeri, dan memperoleh penghargaan inovasi.

• Farid

Presiden Luncurkan

▼ Fondasi Baru Bagi Aparatur Sipil Negara

Care Value

'BERAKHLAK'

Berorientasi Pelayanan
Akuntabel
Kompeten
Harmonis
Loyal
Adaptif
Kolaboratif

Employer Branding

**#Bangga
Melayani
Bangsa**



ASN dan Pegawai BUMN

SEMUANYA SAMA

Harus #BanggaMelayaniBangsa

- 1 *"Saya luncurkan core values ASN 'Berakhlak' dan employer branding ASN 'BanggaMelayaniBangsa'."*
- 2 *"ASN yang berprofesi sebagai dosen, guru, jaksa, dokter, perawat, analls kebijakan, administrator, juga petugas Satpol PP seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama. Bahkan pegawai BUMN dan yang lain juga sebaiknya sama."*
- 3 *"Otoritas dan sumber daya ini harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara."*
- 4 *"Banyak sekali masalah tidak bisa dipecahkan oleh hanya satu dinas, satu daerah, satu kementeoran atau lembaga, maupun satu keahlian, dan disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, daerah, ilmu, dan profesi jadi sangat penting."*
- 5 *"Saat ini dunia menjadi serba hybrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego. Ego sektor, ego daerah, dan ego ilmu."*

Arahan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada *Launching Core Values dan Employer Branding ASN*, Selasa 27 Juli 2021.

... lensa matra





*Penampakan full moon yang terlihat di langit Jakarta pada 24 Juni 2021
Foto oleh Dyah Laksita*

••• lensa matra





Seorang anak melakukan pembelajaran secara daring di pinggir jalan Kramat Raya Jakarta. Foto oleh Aji

ATUR STRATEGI BENAHI BIROKRASI

Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si

Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan
Kementerian PAN-RB (2021-sekarang)

Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (2012-2021)

Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 2 Agustus 1968

Pendidikan:

S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Gadjah Mada (lulus tahun 1992)

S2 Magister Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Universitas
Gadjah Mada (lulus tahun 1997)

S3 Amsterdam School for Social Science Research, Faculty of social
and behavioural science, University of Amsterdam (lulus tahun 2004).



Bagi Erwan Agus Purwanto, untuk mengukur kemajuan sebuah bangsa dapat dinilai dari kapasitas birokrasinya. Jika pelayanan publik di suatu wilayah dianggap bagus dan modern, maka daerah tersebut secara tidak langsung akan menjadi kawasan yang maju (*high income countries*). Hal itu disebabkan birokrasi yang memiliki tata kelola profesional akan mendorong sektor kehidupan lain di suatu negara menjadi produktif dan kompetitif saat berhadapan dengan bangsa lain. Langkah tersebut juga akan memicu masyarakat lebih sejahtera, karena pelayanan publik berjalan tanpa kendala. Sedangkan, untuk mencapai titik tersebut, berbagai pembenahan perlu dilakukan, salah satunya dengan menjalankan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi penting sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membangun, merealisasikan, dan mentransformasikan dirinya menuju tata kelola yang baik (*good governance*),” jelas Erwan.

Guru besar pada bidang Kebijakan

Publik FISIPOL Universitas Gadjah Mada itu menilai, pada era saat ini reformasi birokrasi menjadi hal yang tak terhindarkan, yang harus diterapkan. Penyebabnya, perubahan lingkungan yang serba cepat mendedak, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta permasalahan negara yang semakin kompleks, menuntut kesiapan para *stakeholder* dalam menjalankan proses birokrasi yang tidak biasa.

Apalagi, kata Erwan, birokrasi memiliki peranan vital sebagai tumpuan utama motor penggerak pembangunan nasional. Di mana, unsur adaptif dan responsif menjadi hal tak terelakkan, yang perlu diterapkan guna mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan. “Dengan demikian, tidak mengherankan jika Bapak Presiden menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan di masa pemerintahannya saat ini,” kata pria yang juga Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional tahun 2020-2021 tersebut.

Bermula dari akademisi

Perhatian Erwan yang tinggi pada reformasi birokrasi tidak datang secara tiba-tiba. Sebelum menjabat sebagai Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Kementerian PAN-RB, dirinya telah lebih dulu menjajaki dunia akademisi. Dalam kapasitasnya sebagai dosen dan peneliti, ia terlibat aktif untuk melakukan kajian terhadap isu-isu pemerintahan, seperti pelayanan publik, desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan publik, dan reformasi birokrasi. Hasil-hasil riset tersebut kemudian diterbitkan dalam berbagai bentuk, baik buku maupun artikel di jurnal ilmiah.

Selain itu, pria kelahiran Klaten tersebut juga pernah menjabat sebagai Dekan FISIPOL UGM selama dua periode, yaitu tahun 2021-2014 serta 2016-2021. Dalam kurun waktu tersebut ia berhasil menginisiasi beragam inovasi di kampus bersama koleganya. Di antaranya, pengembangan *digital library*, *One Stop Service* (OSS), *Co-working space*, Fisipol

Perhatian dan kecintaan Erwan Agus Purwanto terhadap dunia birokrasi terbilang cukup besar. Hal itu tercermin dalam kajian dan penelitiannya sejak di dunia akademisi yang banyak membahas tentang pelayanan publik. Kini, dengan amanah baru yang dipercayakan padanya sebagai Deputy Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan di Kementerian PANRB, dirinya bertekad mendorong terwujudnya perbaikan birokrasi yang optimal, demi menciptakan pelayanan publik yang profesional.

Creative Hub, dan lain sebagainya. “Berbagai inovasi tersebut menjadi salah satu pembelajaran dan pengalaman saya untuk beradaptasi di lingkungan birokrasi,” ungkapnya.

Puncak kedekatan Erwan pada reformasi birokrasi terjadi di tahun 2020-2021. Saat itu dirinya didapuk sebagai anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN). Dengan jabatan tersebut, ia merasa lebih mengenal kebijakan reformasi birokrasi dalam lingkup nasional. Lantaran ia kerap diminta memberi masukan dan saran mengenai reformasi birokrasi dalam kapasitasnya sebagai akademisi. Atas dasar itu pula, berbagai publikasi tentang reformasi birokrasi baik berupa buku maupun paper ilmiah telah berhasil ia torehkan. Dirinya berharap, langkah tersebut dapat memberi sumbangsih pemikiran dan ide guna mendukung implementasi pembenahan tata kelola pemerintahan.

Pria lulusan University of Amsterdam itu mengungkapkan, keputu-

sannya untuk terjun langsung di dunia birokrasi tidak lepas dari keinginannya merasakan langsung kondisi bidang yang selama ini ditekuni. Terlebih persinggungannya dengan birokrasi selama ini baru sebatas pada posisinya sebagai akademisi. Ia merasa hal tersebut akan menjadi maksimal manakala dirinya dapat berkontribusi langsung sebagai *policy maker*. Erwan berharap, ke depan apa yang dipelajarinya saat ini bisa memberikan sumbangsih bagi upaya perbaikan reformasi birokrasi.

“Dalam jangka panjang, pengalaman saya di birokrasi saat ini semoga bisa saya bawa kembali ke kampus sebagai bahan pengayaan bagi para mahasiswa yang akan menjadi penerus kita semua untuk mengurus birokrasi,” katanya.

Erwan mencatat, sejak digaungkan pada 2010 lalu, reformasi birokrasi telah menghasilkan banyak perbaikan, di antaranya semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan instansi pemerintah, serta meningkatnya kualitas sumber daya aparatur sipil negara. Tak hanya itu, reformasi birokrasi juga dipandang telah berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta mendorong penggunaan teknologi informasi dalam tata kelola dan pemberian layanan oleh instansi pemerintah. Hal itu diyakini berimbas pada semakin berkurangnya perilaku koruptif di antara aparatur sipil negara.

Erwan menyadari ikhtiar dalam menerapkan reformasi birokrasi masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Lantaran, masih terdapat sejumlah aparatur yang menerapkan cara-cara biasa dalam menjalankan birokrasi. Kendati demikian, dirinya menilai reformasi birokrasi masih berada pada jalur yang benar (*on the right track*). Ia menekankan agar berbagai kalangan seperti akademisi, aparatur sipil negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pengusaha dan masyarakat untuk terlibat aktif mengawal jalannya reformasi birokrasi. Langkah tersebut dapat dicapai dengan memberikan masukan dan pengawasan pada pelaksanaan

reformasi birokrasi, serta tidak memberikan celah bagi aparaturnegera untuk bertindak di luar kode etik atas kewenangan yang diberikan.

“Apabila berbagai hal tersebut dapat dilakukan, saya meyakini birokrasi kita tidak hanya makin baik dari waktu ke waktu, namun juga akan menjadi lebih kompetitif dibanding dengan birokrasi negara-negara lain, khususnya di level ASEAN,” terangnya.

Strategi benahi birokrasi

Erwan menguraikan, pada era VUCA (*Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous*) seperti saat ini, birokrasi publik membutuhkan pendekatan yang inovatif dan *agile*. Menurutnya, birokrasi tidak boleh hanya berkutat pada regulasi, prosedur, hierarki, dan kontrol yang rigid. Hal itu dikarekakan, unsur tersebut rentan menjadikan birokrasi lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan publik yang semakin meningkat. Karenanya, guna meningkatkan pelayanan publik terhadap perubahan situasi yang dinamis dan masa depan yang serba tak pasti, birokrasi dituntut menjadi inovatif dan *agile*.

Menurut Erwan, setidaknya ada empat cara yang dapat dilakukan agar birokrasi dan kebijakan publik dapat terlaksana secara inovatif dan *agile*. Pertama, pemerintah perlu merumuskan perubahan cara kerja birokrasi gaya lama ke cara kerja baru yang lebih terbuka, adaptif, dan responsif. Dengan langkah tersebut, proses birokrasi diyakini dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Kedua, diperlukan ikhtiar untuk membentuk karakter pemimpin yang siap menghadapi lingkungan yang tidak stabil dan tidak dapat diprediksi, dengan pendekatan yang proaktif dan tidak alergi terhadap segala bentuk perubahan. Ketiga, birokrasi perlu dijalankan dengan pendekatan *citizen-centric*, yaitu menempatkan warga negara sebagai memegang peranan penting dalam setiap kebijakan publik yang di-

rumuskan.

“Serta yang keempat, perlu melaksanakan investasi sumber daya manusia untuk dapat menguasai bidang - bidang ilmu baru,” jelas Erwan.

Sementara itu, guna menghasilkan penerapan reformasi birokrasi yang efektif, Erwan mengatakan pemerintah perlu menerapkan percepatan reformasi birokrasi pada sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dinas kependudukan dan catatan sipil, dinas perizinan, kepolisian dan sebagainya. Perbaikan menyeluruh terhadap pelayanan tersebut, dinilai akan memberikan dampak secara nyata pada masyarakat.

Secara khusus, dirinya mengatakan ada beberapa cara dalam melakukan perbaikan. Pertama, penyederhanaan alur, prosedur, syarat, dan waktu layanan. Upaya ini diyakini akan dapat memangkas proses birokrasi menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian, perbaikan layanan juga perlu menasar pada peningkatan etika dan keramahan petugas layanan. Dengan pelayanan secara humanis tersebut, secara tidak langsung masyarakat akan merasa puas. Di samping itu, perbaikan juga dapat dilakukan dengan menekan terjadinya pungutan liar (pungli), suap, atau praktik-praktik koruptif lainnya. Langkah ini dinilai mampu menekan kerugian negara terhadap berbagai konflik kepentingan. “Yang terakhir, sebagaimana arahan Bapak Presiden, birokrasi perlu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal

ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemudahan dan aksesibilitas masyarakat dalam menerima layanan,” jelas Erwan.

Dirinya mencontohkan, sejauh ini beberapa layanan telah berhasil menerapkan inovasi berbasis teknologi, seperti pengurusan SIM *Online*, STNK dan BPKB *Online*, Perizinan *Online*, Pembuatan KTP *Online*, dan lain sebagainya. Langkah tersebut dinilai mampu membantu masyarakat dalam memperoleh kemudahan pelayanan publik. Dirinya mengimbau agar instansi pemerintahan lainnya juga melakukan upaya serupa. Hal itu dimaksudkan agar kualitas pelayanan pemerintahan bisa sejajar dengan yang biasa dilakukan oleh sektor swasta kepada masyarakat.

Erwan berharap, ke depan semakin banyak instansi pemerintah yang mampu mengimplementasikan reformasi birokrasi menuju *good governance* secara optimal. Sebab dengan penerapan langkah tersebut, diyakini akan mendorong terealisasinya visi misi presiden dan ketercapaian pembangunan nasional. Sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Saya juga berharap sinergi dan kolaborasi kementerian pusat yang menjadi *leading institution* pelaksanaan reformasi birokrasi semakin kuat.

Dengan demikian, program reformasi birokrasi ini dapat berjalan lebih efektif dan berdampak, sehingga bisa menjadi suatu persembahan kita bagi bangsa dan negara tercinta,” pungkasnya.

• Farid





... wisata

Menikmati Wisata Alam
Posong
Temanggung

Foto Singgih1991







Foto Kuku Waluyo

Berkunjung ke Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah rasanya kurang lengkap jika tidak mampir ke kawasan wisata Posong. Di tempat itu, terdapat destinasi wisata yang bernuansa alam. salah satunya Taman Wisata Alam Posong. Taman ini terletak di ketinggian di atas 1000 mdpl dan berada di lereng Gunung Sindoro dan berhadapan langsung dengan Gunung Sumbing. Tak heran, kondisi itu menjadikan udara di sana cenderung sejuk dan dingin.

Untuk bisa memasuki lokasi wisata Posong, pengunjung dikenai tarif sebesar Rp 20.000. Dengan harga sebesar itu, pengunjung dapat menikmati gazebo, area taman bermain, serta wahana *flying fox*. Tidak hanya itu, pengunjung juga bebas mencari spot foto menarik, seperti di lokasi yang berlatar Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, atau perke-

bunan kopi dan tembakau yang menghampar.

Di lokasi wisata seluas 1,2 hektar itu, pengunjung juga dapat menikmati fasilitas perkemahan. Wisatawan dipersilakan camping berdasarkan paket-paket yang dipilih. Seperti paket *camp family full service*, *camp family* ekonomi, layanan *full service*, serta paket ekonomi. Setiap pilihan paket memiliki harga dan fasilitas yang berbeda-beda. Para pengunjung dapat mengunjungi lokasi wisata Posong setiap hari mulai pukul 04.30 hingga 17.00 WIB.

Konsep utama wisata Posong Temanggung ialah keindahan alam terbukanya. Sebelum memasuki lokasi utama wisata, pengunjung disuguhi hamparan pemandangan alam berwarna hijau. Tak heran, karena di lokasi yang terletak di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung itu, kerap kali dikenal sebagai kawasan pertanian tembakau. Selain itu,



Foto Nasirullah Sitam

terdapat pula perkebunan kopi yang sebagian besar hasil produksinya dipasarkan ke kafe yang juga terletak di lokasi wisata.

Saat memasuki lokasi wisata, pengunjung dapat menikmati sensasi *golden sunrise*, yaitu pemandangan pancaran sinar matahari yang bercampur dengan awan, yang memberikan efek warna keemasan. Untuk menyaksikan panorama tersebut, wisatawan harus telah berada di sana setidaknya sebelum pukul 04.30 WIB. Pengunjung dapat menyaksikan sinar matahari menyinari Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Muria, dan Ungaran.

Memiliki pesona keindahan alam yang menghampar, pembangunan objek wisata alam Posong Temanggung bermula sejak 2010. Hampir setiap waktu, lokasi wisata Posong terus dikembangkan menyesuaikan konteks kemajuan

zaman, dengan tidak melepaskan nuansa kelestariannya.

Pada 2020, ketika pandemi Covid-19 merebak, lokasi wisata Posong sempat ditutup. Hal itu sebagai antisipasi agar tidak terjadi kerumunan yang mengakibatkan peningkatan penularan virus. Namun, pada bulan Agustus 2020, lokasi wisata kembali dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan dan keamanan. Dengan protokol kesehatan, itu wisatawan diminta untuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan memakai sabun/*handsanitizer* saat memasuki lokasi wisata, serta tidak diperbolehkan memasuki wisata jika dalam kondisi demam atau suhu di atas 37,3 derajat celsius.

(Diolah dari berbagai sumber)



71 DAERAH TURUN LEVEL, DITJEN BINA ADWIL KEMENDAGRI

INGATKAN PEMDA UNTUK TERUS DISIPLIN PROKES

Pemerintah kembali memperpanjang PPKM Level di sejumlah daerah Jawa-Bali sejak Selasa 10 Agustus 2021 hingga 16 Agustus 2021 mendatang. Keputusan ini diambil pemerintah untuk mempertahankan perbaikan sejumlah aspek pandemi Covid-19, termasuk kasus konfirmasi harian (*positive rate*), angka kesembuhan (*recovery rate*), kasus kematian (*fatality rate*), maupun Bed Occupancy Ratio (BOR).

Hasilnya pun cukup menggembirakan. Terdapat 26 daerah di kawasan Jawa dan Bali yang akhirnya bisa lepas dari PPKM Level 4 atau bisa turun ke level 3. Bahkan, ada 1 daerah lagi yang berhasil turun ke PPKM Level 2 di masa perpanjangan ini.

Adapun daerah yang berada di level 2 pada Minggu ini adalah kabupaten Sampang, Jawa Timur. Daerah yang dikenal Kota Bahari ini, berhasil menemani kabupaten Tasikmalaya yang pekan lalu, berhasil juga memberlakukan PPKM level 2.

Artinya 26 daerah ini masuk dalam tingkatan yang tidak beresiko tinggi dalam penyebaran Virus Covid-19.

Dengan adanya penurunan level tersebut, Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Suhajar Diantoro,

mengapresiasi daerah-daerah yang berhasil mengendalikannya penyebaran Covid-19, khususnya Pemerintah Kabupaten Sampang.

“Untuk wilayah Jawa dan Bali, terjadi perbaikan. Di mana kabupaten/kota yang sebelumnya di level 4, semakin berkurang. Level 4 yang sebelumnya 90 lebih, Minggu ini tinggal 71 daerah,” kata Suhajar dalam rapat Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), secara virtual, Selasa (10/8/2021).

“Harapannya tentu semua daerah bisa turun level semuanya ke level yang lebih rendah,” tambah Suhajar.

Namun, ia juga menyatakan masih perlu bekerja keras dan tetap waspada setelah adanya perpanjangan masa berlaku PPKM ini. Penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat, harus ditegakkan dan disesuaikan kondisi masing-masing daerah.

“Saya paham, teman-teman sudah cape, kondisinya memang berat. Tapi kita harus tetap waspada. Tetap pada koridor ikhtiar yang sama dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan di masyarakat,” pungkasnya.

(Sumber: <http://kemendagri.go.id>)



SOSIALISASI BORONGDONG DI LINGKUNGAN BP2D PROVINSI JAWA BARAT

PROGRAM INOVASI CARA PENJUALAN (ICALAN) UNTUK Mendukung Pemulihan Ekonomi Pelaku Ekonomi Kreatif di Jawa Barat

Sosialisasi Borongdong di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, program inovasi cara penjualan (ICALAN) untuk mendukung pemulihan ekonomi pelaku ekonomi kreatif di Jawa Barat secara virtual, Jum'at (4/6/2021).

Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Dedi Sutardi, M.Pd. Narasumber dalam sosialisasi ini adalah TIM Borongdong dan Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Acara sosialisasi dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) BP2D Provinsi Jawa Barat.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat intens berinovasi untuk membangkitkan UMKM. Salah satunya dengan menggagas program ICALAN (Inovasi Cara Penjualan). Dalam program ICALAN, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bersama Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi (KREASI) Jabar dan Bank BJB menghadirkan marketplace bernama borongdong.id. Pelaku UMKM dan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Jawa Barat

dapat memasarkan produknya di platform tersebut.

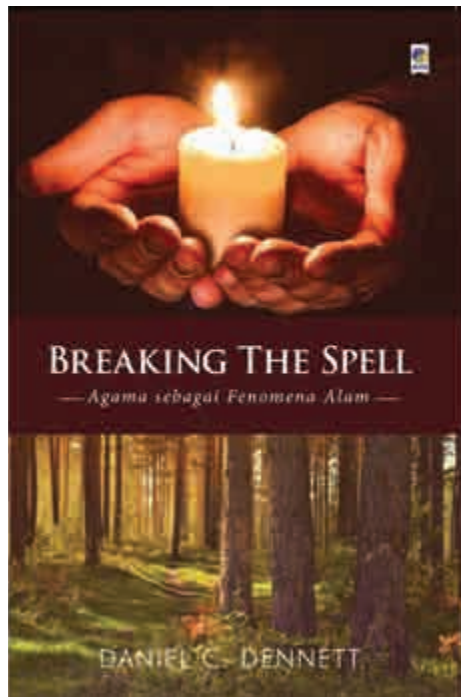
Terdapat sejumlah keuntungan yang didapatkan pelaku UMKM dan ekraf apabila bergabung dalam borongdong.id. Pertama, produk menjadi terdigitalisasi. Pasar pun dipastikan akan meluas. Selain itu, pelaku UMKM dan ekraf memiliki kepastian pembeli. Dalam tahap awal, Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sasaran prioritas.

Sebagai mitra KREASI Jabar dalam program ICALAN, borongdong.id yang menyajikan produk-produk yang sulit terjual dengan cepat (slow moving) ini juga berperan untuk mempercepat transformasi digital UMKM dengan target penjualan mencapai 50.000 produk UMKM Jabar dalam waktu tiga bulan.

Guna menarik minat pasar, akan dibuat promo dan diskon. Selain itu, pelaku UMKM dan ekraf akan memberikan harga yang kompetitif sehingga ASN tertarik belanja di borongdong.id.

(Sumber: <http://bp2d.jabarprov.go.id>)

Agama di Bawah Sorot Lampu dan Mikroskop



Breaking the Spell: Agama sebagai Fenomena Alam

Penulis : Daniel C. Dennett

Penerjemah : Ninus D.

Andarnuswari

Penerbit :

Penerbit KPG

Tahun Terbit & Cetakan:

Cetakan Pertama, Januari 2021

Jumlah halaman :

xii + 452 halaman

ISBN : 978-602-481-519-6

Oleh : Hari Taqwan Santoso

Agama, barangkali adalah barang paling tabu yang dipertahankan peradaban manusia hingga zaman modern. Mengusik agama orang, dapat dengan gampang membuat orang itu emosi, jengkel, bahkan marah dan tak jarang membalas dengan kekerasan. Tidak mengherankan bila dalam pembicaraan yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan antar sesama, pembicaraan mengenai agama seharusnya dihindari guna mencegah pertikaian yang tidak perlu. Hal ini sudah menjadi semacam aturan tak tertulis yang dipahami orang banyak.

Kendati demikian, Daniel Dennett dalam buku *Breaking the Spell: Agama sebagai Fenomena Alam* ini berpendapat sebaliknya. Menurutnya agama justru perlu dibahas secara rinci. Dia bahkan bergerak lebih jauh dengan memperlakukan agama sebagai obyek kajian yang perlu dibedah menggunakan pisau bedah sains. Dennett berargumen bahwa agama adalah fenomena alami yang tidak selayaknya luput dari analisis ketat menggunakan metode-metode ilmiah. Tuhan atau malaikat mungkin bukan obyek ilmiah, namun agama iya. Bahwa agama adalah barang tabu yang tidak layak untuk diperbincangkan, dalam bahasa Dennett, adalah mantra (*spell*) pertama yang hendak dia patahkan dalam buku tersebut.

Namun, kenapa harus repot-repot, menyingsingkan lengan baju dan membuat tangan kita berkeringat serta berisiko memicu kemarahan orang banyak, dengan mematah-

kan mantra ketabuan perbincangan tentang agama? Menurut Dennett, ada mantra yang baik dan ada mantra yang jahat. Maksudnya, agama tidak diragukan lagi mempunyai sisi-sisi baik, namun juga adalah fakta sejarah bahwa ia mempunyai sisi kelam yang merugikan bahkan membahayakan bagi orang-orang. Dennett membayangkan seandainya kita dapat mematahkan sisi-sisi kelam ini.

Kalau saja ada panggilan telepon yang menginterupsi proses di Jonestown di Guyana pada 1978, ketika Jim Jones yang gila memerintahkan ratusan pengikutnya yang tersirap mantra untuk melakukan bunuh diri! Kalau saja kita dapat mematahkan mantra yang mendorong kultus Aum Shinrikyo di Jepang melepas Sarin yang membunuh selusin orang dan melukai ribuan orang di kereta bawah tanah Tokyo! Kalau saja kita dapat mencari suatu cara hari ini untuk mematahkan mantra yang mengiming-imingi ribuan pemuda Muslim miskin untuk memasuki madrasah garis-keras di mana mereka bersiap membunuh sebagai martir, alih-alih diajarkan tentang dunia modern, demokrasi sejarah dan sains! Kalau saja kita dapat mematahkan mantra yang meyakinkan sesama warga kita bahwa mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk meledakkan klinik aborsi! (hal. 12)

Dengan hati-hati, Dennett juga menambahkan bahwa kita tidak perlu melakukan ini seandainya ada jaminannya. Kita tidak punya hak untuk mengusik praktik pribadi seseorang selama kita bisa ya-

kin bahwa mereka tidak merugikan yang lain (hal. 13). Sayangnya, kita tidak tahu kapan hal tersebut berlaku. Bahkan hari ini, berdasarkan contoh-contoh faktual yang ada, justru semakin sulit untuk setuju bahwa hal tersebut akan berlaku.

Hari ini, miliaran orang berdoa demi perdamaian, dan saya tidak akan terkejut jika kebanyakan dari mereka percaya sepenuhnya bahwa jalan terbaik menuju perdamaian dunia adalah jalan yang ditempuh oleh lembaga keagamaan mereka masing-masing, entah itu Kristen, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, atau ratusan sistem agama lainnya. Tentu banyak orang percaya bahwa harapan terbaik umat manusia adalah semua agama di dunia bisa dikumpulkan dalam suatu percakapan yang penuh hormat dengan kesepakatan mutlak tentang bagaimana memperlakukan satu sama lain. Mungkin mereka benar, tapi mereka tidak tahu. Kuatnya kepercayaan seseorang tidak bisa digantikan oleh bukti keras, dan bukti yang mendukung harapan indah ini pun tetap tidak terlalu banyak. (hal.15-16)

Lagipula, dengan meletakkan agama di bawah sorotan lampu dan mikroskop kita akan menjadi tahu, apakah agama benar-benar baik untuk kehidupan, atau justru merusak. Seandainya terbukti bahwa agama memang baik, atau jauh lebih banyak kebaikannya, itu akan berpotensi besar menarik minat orang-orang tidak beriman yang skeptis. Sementara menolak meneliti agama akan berakibat sebaliknya, menimbulkan keraguan yang lebih jauh di hati orang-orang tidak beriman itu. Oleh karena itu, seandainya bukan perlu, maka tidak ada salahnya meneliti fenomena agama dengan memanfaatkan metode ilmiah sebagai pisau bedah. Jika memang agama itu benar, penelitian ilmiah yang ketat atasnya hanya akan mengonfirmasi kebenaran tersebut.

Di keseluruhan buku ini, Dennett berupaya menganalisis bagaimana fenomena agama muncul dan

berkembang. Melalui argumen-argumen spekulatif, dia menunjukkan bahwa, misalnya kepercayaan kepada arwah leluhur yang dianggap mengetahui banyak hal akan berguna bagi orang umum dalam masyarakat primitif karena hal itu dapat melepaskan orang yang bersangkutan dari tanggung jawab dan memindahkannya ke si arwah. Dalam kebimbangan ketika hendak memutuskan salah satu di antara dua perkara, orang akan cenderung terbebani, namun tidak demikian jika keputusan itu dipilih oleh agen yang dia kira lebih tahu daripada dia. Tanggung jawab ada di tangan si pengambil keputusan. Sementara orang lain tidak selalu bisa mengambil alih tanggung jawab itu, maka diperlukan agen lain: arwah leluhur memenuhi kriteria ini. Kendati ada kecurigaan besar bahwa si arwah hanyalah rekaan, namun hal itu bisa dikesampingkan selama tujuan awalnya terpenuhi.

Hari ini kita tidak asing dengan proses serupa. Sebagian dari kita berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk untuk mengambil satu keputusan terbaik dan dengan demikian kita tidak atau kurang terbebani manakala keputusan itu di kemudian hari ternyata membawa akibat yang tidak menyenangkan. Kita selalu berprasangka baik pada-Nya, dan yakin bahwa akibat yang tidak menyenangkan itu sekadar ujian, awal dari kebahagiaan di kemudian hari. Bayangkan jika keputusan yang ternyata berakibat tidak menyenangkan itu diambil oleh diri sendiri atau orang lain, kita akan cenderung berprasangka buruk dan menyalahkan si pengambil keputusan.

Dennett juga menolak bahwa agama adalah satu-satunya sumber moral manusia. Dia menulis, "Menurut banyak orang, agama berperan penting menyokong moralitas dengan cara memberikan alasan berbuat baik yang tak terkalahkan: janji akan adanya nikmat tak terhingga di surga, serta ancaman hukuman tak terhingga di neraka (silakan pilih sesuai sel-

era masing-masing). Tanpa pendekatan gaya "wortel dan tongkat" ilahi ini, konon, orang-orang akan bermalas-malasan tanpa tujuan atau beralih memuaskan hasrat paling rendahnya, melanggar janji, berselingkuh dari pasangan, mengabaikan kewajiban mereka, dan seterusnya. Ada dua masalah yang timbul dari cara pikir ini: (1) tampaknya hal ini tidak benar, dan ini adalah sebuah kabar baik karena (2) perspektif ini sesungguhnya merendahkan sifat manusia" (hal. 283). Dia kemudian berargumen bahwa populasi penjara di AS yang merepresentasikan umat Katolik, Protestan, Yahudi, Muslim dan yang lainnya -termasuk mereka yang tidak mempunyai afiliasi agama- di penjara sama saja dengan jumlah mereka di populasi umum. Ini artinya moralitas seseorang tidak harus bergantung pada agama.

Secara keseluruhan, buku ini sangat bagus untuk menambah wawasan. Kekurangannya, banyak dari gagasan yang ditawarkan berupa spekulasi. Hal itu tidak mengherankan jika mengingat latar belakang penulisnya yang adalah seorang filsuf. Namun filsafat sendiri bukan bagian dari sains, dan klaim yang digaungkan Dennett di awal adalah meneliti agama berdasarkan sains. Meski begitu, dia menutupi kekurangan itu dengan mengusulkan penelitian lebih jauh di beberapa tempat dalam buku tersebut. Kekurangan kedua, sebagian besar data atau kasus yang diperbincangkan diambil dari A.S. Ini juga wajar karena Dennett sendiri orang Amerika. Namun, ini memberikan kesulitan bagi pembaca luar negeri yang tidak banyak tahu tentang peristiwa-peristiwa lokal terkait agama di A.S. Kekurangan ketiga, Dennett mungkin berusaha untuk berhati-hati dalam menyampaikan setiap argumennya. Namun tindakan itu justru membuat argumen-argumen yang diutarakan Dennett terkesan bertele-tele. Terkadang, orang harus membaca ulang satu sub-bab beberapa kali untuk memahami ke mana arah pemikiran penulisnya.

Manusia: Makhluk yang Baik Hati



Human Kind: Sejarah Penuh Harapan

Penulis : Rutger Bregman

Penerjemah : Zia Anshor

Penerbit :

Gramedia Pustaka Utama

Tahun Terbit: 2020

Jumlah halaman :

xxiv + 444 halaman

ISBN : 978-602-06-4919-1

Oleh : Hari Taqwan Santoso

Pertanyaan tentang apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat telah menghantui benak para pemikir di sepanjang zaman. Thomas Hobbes mengajukan gagasan yang berani bahwa manusia itu pada dasarnya jahat. Homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi sesamanya. Namun dunia tidak senantiasa diwarnai dengan pertempuran berdarah. Itu, kata Hobbes, karena manusia telah mengembangkan apa yang disebut kontrak sosial. Seseorang tidak mengganggu orang lain dan sebagai imbalannya dia tidak diganggu. Orang tidak bisa tidur dengan tenang manakala berpikir bahwa tetangganya akan mencuri barangnya, atau bahkan menggorok lehernya sampai mati, saat dia sedang tertidur lelap. Masyarakat semacam itu akan lelah sendiri dan tidak akan bertahan lama. Jadi, kenapa tidak dibuat kesepakatan saja untuk tidak saling mengganggu? Demikian Hobbes menalar.

Jean-Jacques Rousseau berpendapat sebaliknya. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang baik hati, namun munculnya konsep hak milik membuatnya menjadi jahat. Semakin sedikit seseorang melakukan kontak dengan orang lain, makin sedikit pula masalah di antara mereka. Jika seseorang hidup sendirian dan tidak mengenal orang lain, maka tidak akan ada alasan baginya untuk merasa cemburu atau tidak percaya. Konsep hak milik juga tidak punya makna ketika seseorang se-

batang kara di dunia. Oleh karena itu, watak alami manusia adalah baik, namun lahirnya peradaban yang membuat manusia mencestuskan konsep hak miliklah yang membuatnya menjadi jahat.

Sementara itu, jauh setelah zaman keduanya berlalu, Rutger Bregman dalam *Human Kind* ini mengajak pembaca untuk mengikuti Rousseau dengan argumen-argumen modern. Manusia pada dasarnya baik hati, namun karena sebab-sebab tertentu banyak orang yang kemudian menjadi jahat. Menurut Bregman, sebab tersebut ada tiga: empati buta, kekuasaan dan cap buruk.

Empati buta adalah rasa menjadi bagian dari sesuatu. Kesamaan ras, persahabatan, agama dan pilihan politik menjadikan orang-orang lebih mungkin bersekutu alih-alih berseteru. Sebaliknya, kita gampang curiga, menilai buruk bahkan memusuhi mereka yang ras, kelompok kawan, agama atau pilihan politiknya berbeda dari kita. Penilaian moral kita menjadi tidak objektif. Seringkali orang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya jahat, namun karena itu juga dilakukan oleh kawan atau keluarganya, maka tindakan-tindakan itu tampak baik di matanya. Ini berlaku untuk terorisme. Tidak ada yang namanya sifat rata-rata untuk teroris. Teroris itu beragam, dari yang berpendidikan tinggi sampai rendah, kaya sampai miskin, konyol sampai serius, religius sampai ateis (hlm. 209).

Jika ada kesamaan di antara mereka, itu adalah bahwa mereka gampang dipengaruhi, yakni dipengaruhi oleh pendapat orang lain atau pemegang wewenang (hlm. 210).

Bregman juga mengutip penelitian Kiley Hamlin terhadap bagaimana manusia melakukan penilaian baik-buruk ketika masih bayi berumur enam bulan. Penelitian itu dilakukan dengan menunjukkan sandiwara boneka pada bayi. Beberapa boneka digerakkan sedemikian rupa sehingga tampak menolong boneka lain (boneka baik) dan beberapa yang lain tidak (boneka jahat). Hasilnya, hampir semua bayi meraih boneka baik. Namun, beberapa tahun kemudian Hamlin membuat variasi. Pertama, bayi diberi pilihan biskuit manis atau buncis untuk mengetahui mana yang lebih disukai si bayi. Tidak mengherankan jika kemudian bayi memilih biskuit manis. Lalu beberapa boneka ditampilkan menyukai biskuit dan beberapa yang lain menyukai buncis. Bayi-bayi percobaan tersebut ternyata lebih memilih boneka yang menyukai biskuit meskipun itu boneka jahat.

Selanjutnya, kekuasaan membuat orang menjadi rentan pada sifat sewenang-wenang. Seorang pejalan kaki akan cenderung lebih rendah hati dibandingkan dengan orang yang mengendarai mobil dan orang yang mengendarai mobil biasa akan cenderung lebih sopan pada pejalan kaki dibanding orang yang mengendarai mobil mewah.

Dacher Keltner, seorang professor psikologi Amerika, melakukan penelitian untuk mempelajari psikologi kekuasaan (hlm. 227). Dia meneliti kelompok-kelompok orang mulai dari asrama sampai perkemahan musim panas, di mana mereka dibiarkan bersaing bebas demi dominasi. Awalnya dia berhadapan dirinya menemukan persaingan yang sarat keculasan dan kelicikan untuk berkuasa, namun akhirnya dia harus kecewa. Dalam kelompok-kelompok seperti itu orang yang sombong dianggap brengsek

dan dijauhi. Tak jarang orang semacam itu akan diusir dari perkemahan. Sementara orang yang berkuasa adalah yang paling ramah dan empatik. Dengan kata lain, yang paling ramah adalah yang paling berhasil.

Namun itu adalah hasil yang didapat ketika orang-orang mulai dari keadaan sama-sama tidak berkuasa. Keltner juga meneliti efek kekuasaan setelah dimiliki orang. Dia membentuk beberapa kelompok relawan yang terdiri dari tiga orang per kelompok dan menunjuk satu orang sebagai pemimpin. Setiap kelompok diberi etika khusus dan tugas-tugas sederhana untuk diselesaikan. Dalam satu tugas, mereka diberi lima buah kue kering untuk dibagi bertiga namun harus mengembalikan satu. Jadi pada dasarnya mereka membagi empat kue untuk tiga orang. Hasilnya, pada hampir semua kelompok, kue keempat dimakan oleh si pemimpin. Tidak hanya itu, si pemimpin lebih jorok dalam tata cara makan dengan menyisakan lebih banyak remah.

Hal terakhir yang dapat membuat orang baik menjadi jahat adalah cap buruk, yang menyakup anggapan dan sikap terhadap orang tersebut. Ketika kita punya harapan negatif pada seseorang, kita tak sering memandang dia. Kita menjauhkan diri dari dia. Kita tak banyak tersenyum ke dia.

Sebuah penelitian yang kemudian terkenal dengan istilah “The Monster Study” dilakukan oleh psikolog Wendell Johnson pada 1939 (hlm. 260). Dia membagi dua puluh anak yatim piatu dalam dua kelompok, memberitahu satu kelompok bahwa mereka bisa berbicara dengan baik dan lancar, sementara kelompok lain lagi ditakdirkan akan gagap. Hasilnya tepat seperti anggapannya -seperti capnya. Percobaan itu mendapat gelar monsternya karena menyebabkan sebagian orang di kelompok kedua mengalami gangguan bicara seumur hidup. Ketika orang diberi harapan rendah mereka tidak akan menghasilkan prestasi terbaik, yang pada giliran berikutnya mengundang

harapan rendah dari pihak lain dan mereka semakin tidak berprestasi. Lingkaran harapan negatif bahkan mampu menghancurkan organisasi.

Secara keseluruhan, buku ini sangat positif. Sekali lagi, penulisnya mengajak kita untuk percaya bahwa pada dasarnya manusia itu baik. Dengan membacanya kita menantang diri kita sendiri untuk berpikir ulang tentang orang-orang yang kita anggap jahat. Dengan memahaminya kita menjadi ragu dan bertanya, sudah tepatkah anggapan kita itu?

Barangkali kita memang memerlukan cara pandang baru terhadap watak orang-orang di sekitar kita.



Rutger Bregman
Penulis Buku *Human Kind: Sejarah Penuh Harapan*

DE OOST

De Oost hadir sebagai film yang menyoroti kekejaman militer Belanda selama perang kemerdekaan Indonesia pada 1946. Berkat garapan apik dari sutradara, kita dapat menyaksikan aksi banal dari Raymond Westerling saat melakukan pembantaian massal di Sulawesi Selatan.





“Apakah nama kamu Puang Side?”

“Benar Tuan”

Dor!

Seketika seorang perwira Belanda tanpa ragu melepaskan timah panas yang menghujam tepat di kepala pemuda Desa Lisoe, Sulawesi Selatan itu, saat ia mengiyakan namanya Puang Side. Si perwira kemudian meletakkan becengnya. Ia nampak santai meskipun banyak korban jiwa tergeletak karena ulahnya. Si perwira kembali membuka buku catatan kecilnya. Dengan lantang kemudian ia merapal nama yang dianggap sebagai “ekstrimis”. Isak tangis selalu mengiringi warga yang tersebut dalam catatan itu, karena mereka tahu nasibnya akan sama dengan puluhan warga desa lainnya yang lebih dahulu disebut. Mati tanpa sempat mengucapkan salam perpisahan dan pembelaan.

Demikianlah cara perwira Belanda bernama Kapten Raymond Pierre Paul Westerling (diperankan oleh Marwan Kenzari) memimpin Depot Pasukan Khusus untuk memberantas pemberontakan. Westerling diceritakan bersama pasukannya keluar masuk desa-desa di Sulawesi Selatan untuk menangkap warga yang ia anggap sebagai pelaku teror.

De Oost

Sutradara: Jim Taihuttu

Skenario : Mustafa Duygulu, Jim Taihuttu

Pemain : Martijn Lakemeier, Marwan Kenzari, Jonas Smulders, Abel van Gijlswijk, Coen Bril, etc.



Operasi gelap tersebut mendapat dukungan penuh dari petinggi Belanda. Westerling membalas aksi teror yang dilakukan pejuang Indonesia, dengan memberikan kengerian yang lebih kejam. “Mereka itu seperti rumput yang akan selalu tumbuh, maka kita harus memberantasnya dengan mencabut sampai ke akar-akarnya,” kata Westerling kepada para pejabat teras Belanda sebelum ia ditugaskan.

Sutradara Jim Taihuttu seorang warga Belanda keturunan Maluku kemudian menghadirkan sosok fiktif Johan de Vries (Martijn Lakemeier) yang akan memberikan kita sudut pandang lain. Film sesungguhnya bermula dari

kisah Johan, seorang tentara muda Belanda yang ditugaskan di tanah air, tepatnya di wilayah Semarang. Kala itu setahun pasca proklamasi, Belanda masih berkeinginan agar Indonesia tetap menjadi wilayah koloni yang dapat dikontrol, sehingga Belanda menugaskan banyak pasukan di Indonesia.

Di babak awal, film memang berjalan sangat lambat. Namun justru dengan cermat sutradara menggunakannya untuk menggambarkan suasana tanah air yang masih menghadapi konfrontasi. Nama Soekarno menjadi bahan pembicaraan di kalangan pasukan Belanda. Soekarno diang-



gap sebagai biang keladi kerusuhan yang terjadi, sehingga tentara di doktrin bahwa kehadiran mereka adalah untuk menyelamatkan warga dari segerombolan teroris. Johan muda yang memiliki idealisme tinggi pun dengan semangat menjalankan penugasan tersebut. Setiap hari Johan dan rekan-rekannya berpatroli ke desa-desa. Sesekali ia berusaha mengajak warga desa berkomunikasi dengan kemampuan bahasa seadanya untuk menanyakan keberadaan dari pemberontak.

Dalam film ini, kita juga akan dimanjakan dengan lanskap memorial dari sudut-sudut kota seperti pasar dan perkampungan warga desa, dengan segala aktivitas di dalamnya. Rasanya belum ada film dengan tema serupa yang begitu detail menyuguhkan nuansa Indonesia saat awal kemerdekaan. Kabarnya asisten sutradara Jazzy Taihutu mesti satu tahun tinggal di Indonesia untuk mempersiapkan semuanya.

Intrik kisah percintaan juga hadir dari Johan yang menjalin kisah asmara dengan warga setempat bernama Gita (Denise Aznam). Di wilayah Semarang juga, Johan bertemu untuk pertama kali dengan sosok Westerling. Johan lantas tertarik dengan sosok Westerling yang menurutnya melakukan aksi yang lebih nyata untuk menumpas pemberontakan. Hingga akhirnya Johan terlibat operasi penyeragaman yang menegangkan bersama Westerling.

Sejak saat itu, Westerling kagum dengan impresi dari Johan yang memiliki watak tegas dan cekatan, hingga menjadikan Johan sebagai tangan kanannya. Sebuah posisi yang membawa dirinya sehari-hari bersama Westerling dalam setiap kesempatan, hingga penugasannya ke Sulawesi Selatan.

Namun, setelah Johan melihat sepak terjang Westerling yang melakukan “pembersihan” di Sulawesi Selatan

—menurut sejarah Indonesia mencapai 40 ribu orang— ia mengalami gejolak hebat. “Kita tak bisa seratus persen yakin penduduk yang ditembak itu memang terlibat dalam pemberontakan,” ujar Johan yang mencoba meyakinkan Westerling bahwa cara yang dilakukannya dalam menumpas pemberontakan adalah salah besar.

“Kalau kamu bisa menunjukkan metode yang lebih baik dari ini, sampaikan sekarang. Namun bila tidak cepat pergi dari hadapan saya,” tegas Westerling yang menyanggah pendapat dari Johan. Perasaan dilematis Johan makin tinggi seiring pembantaian yang terus dilakukan Westerling. Keteguhan prinsip yang dimiliki Johan menjadikan dirinya nantinya memilih jalan yang berseberangan yang kembali menimbulkan konflik.

Hari demi hari Westerling terus melancarkan aksi terornya, sampai akhirnya wewenang Westerling pun dihentikan

setelah dua tahun menjalani misi. Dalam catatan sejarah, sosok Westerling pun dipuji media dan masyarakat Belanda, meski sebagian petinggi Belanda gerah dengan metodenya.

De Oost bukanlah film sejarah yang menceritakan tentang kisah Westerling secara lengkap dan presisi. Bahkan bagaimana nasib Westerling di akhir film pun disajikan secara fiktif. Film ini lebih ingin membawa penonton untuk mengutuk segala ekses dari peperangan yang selalu tergores dengan darah dan kematian. Menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia, film ini sangat cocok ditonton untuk kembali mengingat getirnya kehidupan di awal kemerdekaan dahulu.

• Aji



Abdi Negara yang juga Abdi Praja



M. Rizki Luthfiah Aziz, S.H.Int., M.I.Pol
 Analis Perencana dan Kerja Sama
 Badan Litbang Kemendagri

Bila ada profesi yang menyita perhatian masyarakat Indonesia, Pegawai Negeri Sipil mungkin jadi salah satunya. Setiap tahunnya, pemerintah selalu membuka penerimaan untuk menjadi seorang abdi negara, dan lowongan tersebut tidak pernah sepi peminat. Namun di balik itu semua, ternyata profesi PNS atau bisa kita sebut sebagai abdi negara ini memiliki sejarah panjang yang menarik untuk disimak. Untuk memahaminya, kita dapat menilik tulisan dari Kuntowijoyo dalam bukunya *Raja, Priyayi, dan Kawula* serta Petani, Priyayi, dan Mitos Politik. Selain itu ada pula referensi dari peneliti asing yang sengaja datang ke Indonesia yaitu Heather Sutherland yang mengabadikan penelitiannya dalam buku *The Making of Bureaucratic Elite*. Dengan membaca tulisan mereka, maka kita dapat memahami eksistensi dari abdi negara dari zaman ke zaman.

“Masa keemasan” abdi negara sendiri berada saat kolonial Hindia Belanda berkuasa sekitar tahun 1942. Saat itu abdi negara sudah barang tentu adalah seorang priayi/ bangsawan. Gambaran awam tentang bangsawan pasti mengarah pada mereka yang bekerja untuk raja di lingkungan istana dan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan. Proyeksi sederhana ini memang tidak salah. Hal ini dikuatkan dalam buku *Raja, Priyayi dan Kawula* (1907), Kuntowijoyo mengutip artikel Djoko Setyardo menulis “Priayi adalah pegawai Pemerintah Kolonial. Apa pun pekerjaannya, mereka yang mengabdikan kepada raja sudah barang tentu adalah priayi”.

Di masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda juga sejatinya sudah menerapkan konsep otonomi daerah. Penerapan konsep itu dilakukan dengan didirikannya *Binnenlands Bestuur* yang merupakan lembaga negara yang bertugas mengatur dan menjalankan roda birokrasi di Nusantara. Lembaga ini dianggap cikal bakal berdirinya Kementerian Dalam Negeri. Pada masanya,

Binnenlands Bestuur berisikan para birokrat Belanda yang bertugas menjaga keharmonisan hubungan pemerintah pusat kolonial di Batavia dengan daerah jajahan yang masing-masing memiliki penguasa lokal. Penguasa lokal adalah raja keraton yang diangkat atas restu pemerintah kolonial Hindia Belanda. Raja-raja lokal ini digabung dalam lembaga yang disebut *Inlands Bestuur* dan inilah bentuk dari otonomi daerah di masa silam. Kemajuan pembangunan dan kondisi sosial masyarakat di setiap kabupaten sangat bergantung pada raja lokal yang memimpinya.

Dalam tata kelola pemerintahan, para raja lokal harus berkoordinasi dengan birokrat-birokrat *Binnenlands Bestuur* yang merupakan “*bule-bule londo*”. Jabatan-jabatan yang diemban oleh pejabat *Binnenlands Bestuur* di antaranya: *gouverneur* (gubernur), *resident* (membawahi beberapa kota), dan *burgemeester* (wali kota). Sedangkan *Inlands Bestuur* adalah wadah yang menyatukan raja-raja dan kerabat-kerabatnya yang direstui untuk menjadi bupati, wedana (membawahi beberapa kecamatan), lurah ataupun kepala desa. Semuanya adalah para ningrat yang disesuaikan dengan garis kedekatannya dengan raja. Semakin dekat garis kekerabatannya maka semakin tinggi pula jabatan yang bisa diemban, begitu pula sebaliknya. Inilah mengapa daftar bupati-bupati generasi awal di Indonesia pasti berasal dari para bangsawan. Sebagai contoh daftar lima Bupati Garut, Jawa Barat pertama adalah: Raden Adipati Aria Adiwijaya (1813-1831), Raden Adipati Aria Kusumadinata (1831-1833), Tumenggung Jaya Diningrat (1833-1871), Raden Adipati Aria Wiratanudatar VII (1871-1915), Raden Adipati Soeria Kartalegawa (1915-1929). Dalam menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, setiap kepala daerah dibantu oleh sejumlah priayi. Meskipun beberapa priayi juga ada yang mengabdikan dirinya menjadi birokrat *Binnenlands Bestuur* dan bahkan ada yang berhasil menduduki jabatan tinggi. Namun yang ingin ditekankan di sini adalah priayi lokal yang membantu raja mengatur wilayahnya yang juga kampung halamannya.

Di sisi lain, bentuk pemerintahan modern di masa kolonial dapat kita lihat di Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta sebagai dua wilayah yang memiliki struktur birokrasi yang sudah mapan dan tertata rapi. Agaknya hal itu pula yang mendorong slogan Kota Yogyakarta sebagai Kota Praja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ‘praja’ berarti ‘negeri’ atau ‘kota’. Maka dulu para priayi dikenal juga se-

bagai Pangreh Praja, bahkan *Inlands Bestuur* sendiri dianggap terjemahan bahasa Belanda dari Pangreh Praja. Menurut kamus kata 'pangreh' berarti 'penguasa' maka Pangreh Praja berarti 'penguasa negeri' atau 'penguasa kota'. Memang konotasinya terkesan represif bila didengar di masa sekarang. Namun sesungguhnya penamaan pada masa lalu tersebut menggambarkan peran dan tugas priayi yang kala itu memang memiliki kewenangan yang besar dalam mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dalam satu wilayah. Mulai urusan pertanian, perdagangan, pemungutan pajak, pencatatan kependudukan, hingga soal keamanan dan ketentraman, kesemuanya berada dalam kepengurusan priayi.

Seiring perkembangan zaman istilah Pangreh Praja berubah menjadi 'Pamong Praja' yang berarti 'pengayom negeri' dan istilah ini berlaku hingga kini. Pada akhirnya kesadaran para pelaku pemerintahan semakin jelas bahwa para priayi, baik disebut sebagai Abdi Raja, Pangreh Praja, lalu beralih menjadi Pamong Praja, semuanya secara esensial adalah

seorang Abdi Negara. Hal ini karena pengabdian kepada negara lebih utama daripada pengabdian kepada individu seorang raja. Sedangkan Abdi Negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat karena perantugasnya berkaitan dengan pengelolaan suatu wilayah akan tepat disebut sebagai Abdi Praja, yang secara harfiah berarti orang yang mengabdikan pada kotanya.

Pada kondisi struktur birokrasi pemerintahan Indonesia modern kini tidak seluruh Abdi Negara adalah Abdi Praja. Mereka para penerus langsung *Inlands Bestuur*-lah yang masih menjalankan fungsi sebagai Pangreh Praja, bukan Pegawai Negeri di tingkat pusat melainkan justru mereka yang bekerja di pemerintah daerah tingkat terkecil, yaitu pemerintah daerah kabupaten atau kota. Namun yang menarik pada tingkat pusat terdapat Abdi Negara yang bertugas mengawasi dan membina lembaga tempat para Abdi Praja bekerja, yang pada masa kolonial Belanda dulu tugas ini diemban oleh para pejabat *Binnenlands Bestuur*. Peran utama Abdi Negara ini dapat

diumpamakan sebagai jembatan penghubung yang bertugas memastikan terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Secara fundamental peran tugas ini masih dijalankan dalam wujud Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu Abdi Negara di dalamnya memiliki kekhasan dan keunikan karena merupakan pembina dan pengawas pemerintah daerah.

Meskipun di masa modern untuk menjadi Abdi Negara tidak harus berdarah biru alias ningrat, namun sejatinya mereka tetap menjadi bentuk dari priayi modern yang berarti sekelompok insan yang diamanati oleh negara untuk mengatur jalannya roda pemerintahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga sepatutnya setiap Abdi Negara selalu memberikan contoh baik dapat menjadi tauladan dalam bersikap, bertutur kata, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat umum sebagai wujud pengabdian kepada negara.



Mendaur Ulang Tradisi Kehidupan Masyarakat Desa dalam Penanganan Covid-19 Melalui Keterlibatan Emosional dan Situasi Kelompok

Covid-19 yang dinyatakan sebagai Pandemi oleh WHO, menyebar dengan sangat cepat dan masif ke seluruh penjuru dunia. Kita tersentak, tidak menyangka wabah yang mempengaruhi semua aspek kehidupan dalam skala yang tidak terbayangkan ini akan terjadi, dan kita tidak memiliki ilmu dan pengetahuan yang memadai terkait dampaknya. Dalam setiap krisis, kaum miskin selalu menjadi korban menanggung beban terberat. Salah mengelola kelompok miskin dan termiskin ini dapat berakibat pada bencana susulan seperti kelaparan, penyakit dan menurunnya tingkat kesejahteraan (Arif Budi Rahaman, 2020). Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk melindungi warga miskin khususnya di perdesaan selama pandemi. Pengentasan kemiskinan di level desa merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak pandemi. Data Badan pusat statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,79 juta jiwa pada September 2019 (sebelum pandemi). Persentase penduduk miskin di desa adalah 12,6 %, sedangkan di kota 6,56 %. Mengingat persentase kemiskinan di desa lebih tinggi dari perkotaan, potensi penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) di perdesaan akibat pandemi perlu mendapat perhatian. Kendati pemerintah desa kini mendapat kucuran dana lebih banyak, ternyata masih banyak desa-desa di Indonesia masih berstatus terbelakang. Berdasarkan indeks pembangunan desa (IPD) tahun 2018 yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada 14.461 desa (19,17%) dengan status tertinggal.

Di butuhkan inovasi bahkan revolusi ilmu pengetahuan baru dan segera meninggalkan tradisi-tradisi lama untuk terus berjuang mengejar pertumbuhan ekonomi yang mengalami stagnasi dan kontraksi di level masyarakat desa. Sejak dana desa di salurkan pada tahun 2015 di tambah alokasi dana desa (ADD) 10 % dari dana transfer umum pemerintah pusat ke daerah, kapasitas fiskal desa meningkat drastis. Secara akumulatif selama lima tahun terakhir, pemerintah telah menyalurkan tidak kurang Rp. 257 triliun dana desa. Jika di tambah akumulasi ADD sebesar 176 triliun selama 2015–2019, dana mengalir ke desa



Syarif Makmur, M.Si
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
Badan Litbang Kemendagri

sudah mencapai lebih dari Rp. 433 triliun. Hakikatnya, dana desa menjadi tumpuan harapan bagi terwujudnya kemandirian desa. Untuk meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi serta terhambatnya pembangunan desa akibat wabah Covid-19, penggunaan dana desa di prioritaskan untuk mewujudkan tujuh tipologi desa, yaitu: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Di harapkan dari tujuh kebijakan tipologi masyarakat desa diatas terjadi perubahan-perubahan positif perilaku kehidupan masyarakat desa. Kesadaran sosial masyarakat desa amat menentukan di tengah pandemi Covid-19 yang terus melonjak dan menghantam sebagian besar masyarakat desa terpapar Covid-19.

Sebagaimana hasil penelitian Mahmud et.al (2020) bahwa *social consciousness* atau kesadaran sosial dapat mengontrol tingkat penyebaran Covid-19 suatu Negara. Peningkatan kesadaran sosial di tengah masyarakat dapat membantu negara dalam mengontrol penyebaran Covid-19. Namun ternyata saat ini kesadaran sosial masyarakat di Indonesia terhadap Covid-19 masih kurang. Kesadaran masyarakat desa terhadap pandemi saat ini dapat di ukur dari keterlibatan mental dan situasi kelompok masyarakat desa. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 Tahun 2021 tentang pemberlakuan dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tingkat desa dan kelurahan. Desa dan kelurahan harus menjadi fokus utama dalam penanganan pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan melalui komunitas inilah penularan Covid-19 harus di tangani secara sungguh-sungguh, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada di desa dan kelurahan. Dalam penanganan Covid-19 di kelurahan dan desa, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerapkan kebijakan penanganannya mengingat berbagai aspek *socio cultural* yang masih kental dan melekat



Foto Kompas

di komunitas ini (Durkheim. 1922). Oleh karena itu berbagai pendekatan situasional perlu dilakukan dan salah satunya melalui pendekatan sosiologi pemerintahan.

Sosiologi pemerintahan memberikan petunjuk bagaimana sebuah implementasi kebijakan pemerintah bisa berjalan efektif di tingkat desa sangat di tentukan oleh 3 (tiga) variabel kunci yaitu kemandirian, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat (Ndraha, 1987). Menurut Ndraha partisipasi masyarakat desa dapat meningkat dalam merespons berbagai implemenasi kebijakan pemerintah bila tercipta kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa. Tanpa kemandirian dan keberdayaan masyarakat desa sangat sulit partisipasi masyarakat di tumbuhkan dan di tingkatkan (Ndraha, 1987 : 116). Dalam penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan, partisipasi masyarakat nya di desain dan di rancang untuk dapat tumbuh keterlibatan mental dan keterlibatan emosional mereka terkait pandemi Covid-19 yang sangat membahayakan kelangsungan kehidupan masyarakat desa saat ini dan kedepan. David dan Newstroom (1996) mendefinisikan partisipasi sebagai “keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok

dan mereka berbagi tugas tanggung jawab untuk mencapai tujuan”. Dari definisi konsep partisipasi diatas di dapatkan 6 (enam) aspek atau dimensi kunci yaitu: (1) keterlibatan mental, (2) keterlibatan emosional, (3) situasi kelompok, (4) pembagian tugas, (5) tanggung jawab dan (6) Tujuan.

Kita sangat paham bahwa partisipasi masyarakat sangat di tentukan oleh situasi kelompok, bila situasi kelompok-nya kondusif dan tertib maka hampir di pastikan partisipasi masyarakatnya baik dan efektif. Secara sosiologis pun keterlibatan emosional memegang peranan kunci. Ikatan pertemanan, ikatan persahabatan hingga ikatan kekeluargaan masyarakat desa di tentukan oleh seberapa besar keterlibatan emosional mereka dalam merespons sesuatu hal. Bila keterlibatan emosional mereka tinggi dan baik, maka keterlibatan mental mereka pun akan baik. Komunitas desa menurut para ahli harus di dekati dengan pendekatan sosio cultural. Pendekatan ekonomi dan teknologi justru dalam beberapa kasus telah menghancurkan dimensi-dimensi sosial masyarakat desa (Parson, 1965). Secara teoretik dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat desa merespons penerapan kebijakan pemerintah melalui Instruksi Men-

teri Dalam Negeri ini sangat di tentukan oleh situasi kelompok. Dalam berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat desa (Makmur, 2002) situasi kelompok memegang peranan utama, jika situasi kelompok baik, maka akan di ikuti oleh keterlibatan mental, keterlibatan emosional dan tanggungjawab yang tinggi dari warga desa dalam penanganan Covid-19 (David & Newstroom, 1996). Namun sebaliknya jika situasi kelompok terganggu maka akan berdampak kepada keterlibatan mental, keterlibatan emosional dan tanggung jawab warga desa yang rendah. Situasi kelompok dipelajari dari teori organisasi dan perilaku organisasi. Struktur organisasi merupakan pola dan kelompok pekerjaan dalam suatu organisasi, sebagai sebab pentingnya perilaku individu dan kelompok (Gibson, 1997). Perilaku kelompok dan perilaku organisasi memiliki kesamaan yang dapat dilihat dari keterlibatan mental dan keterlibatan emosional serta tanggung jawab mereka terhadap organisasi termasuk tanggung jawab warga desa terhadap organisasi pemerintahan desa. Keterlibatan emosional dan situasi kelompok adalah jantungnya partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Menjaga Hidup Sehat dengan Alpukat

Ikhtiar menjaga tubuh agar tetap prima merupakan sebuah keharusan. Namun bagi beberapa orang menerapkan hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari dinilai masih sulit. Lantaran tak sedikit yang menganggap penerapan pola hidup sehat identik dengan biaya mahal. Padahal, untuk memperoleh tubuh yang fit, seseorang hanya perlu melakukan langkah sederhana, salah satunya mengonsumsi buah-buahan, termasuk alpukat.

Mengutip Medical News Today, di dalam buah alpukat terdapat nutrisi yang melimpah. Hal itu terlihat dari seberat 40 gram alpukat, diketahui mengandung 64 kalori, hampir 6 gram lemak, 3,4 gram karbohidrat, kurang dari 1 gram gula, dan sekitar 3 gram serat. Alpukat juga memiliki beragam vitamin yang bagus untuk tubuh, seperti vitamin C, E, K, dan B-6. Selain itu buah berbiji satu tersebut juga memiliki riboflavin, niasin, folat, asam pantotenat, magnesium, dan kalium.

Peneliti di Universitas of Illinois, Sharon Thomson mengatakan mengonsumsi alpukat membantu kita terjaga dari potensi kegemukan. Selain itu, buah tersebut juga dapat memperlancar usaha untuk diet. "Makan alpukat membantu Anda merasa kenyang dan mengurangi konsentrasi kolesterol darah," katanya.

Dengan mengonsumsi alpukat, secara tidak langsung juga akan mendorong kerja jantung tetap sehat. Hal itu dipicu kandungan sterol alami atau yang lazim disebut beta-sitosterol dalam alpukat yang menjaga kolesterol tetap pada kadar ideal. Dengan kadar kolesterol yang stabil, jantung akan bekerja di titik aman. Selain itu, kalium yang terdapat di dalam alpukat juga memiliki fungsi, salah satunya

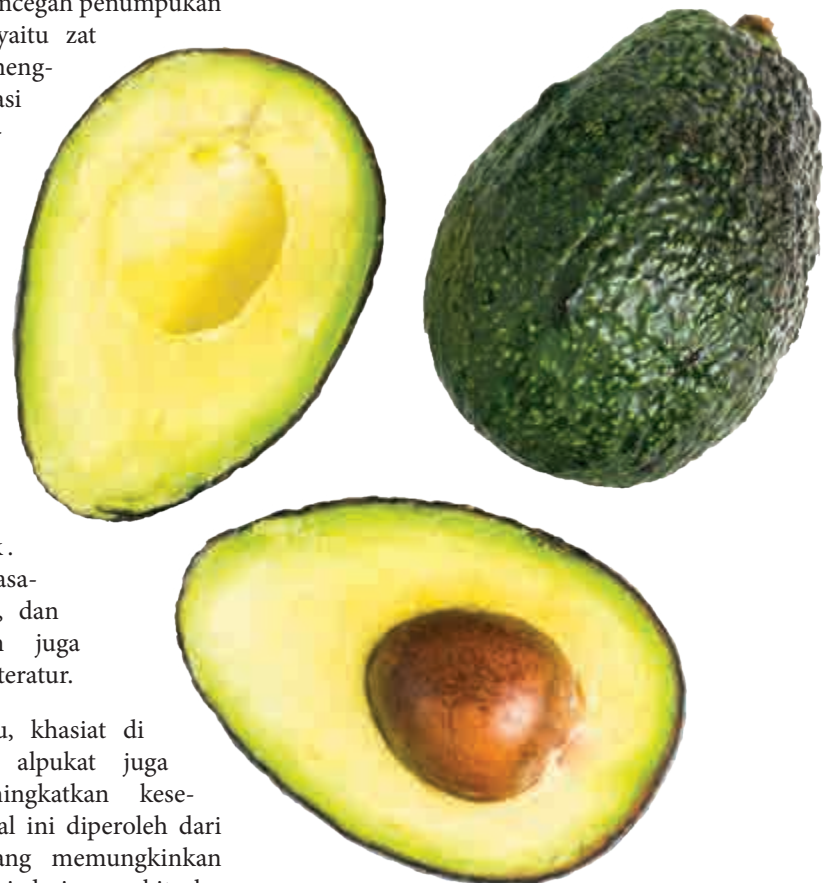
adalah menjaga detak jantung tetap stabil.

Di sisi lain, melansir situs kesehatan www.klikdokter.com, konsumsi terhadap alpukat juga dapat menjadi ikhtiar untuk mencegah dan memaksimalkan pengobatan kanker. Hal itu dipicu kandungan asam folat di dalamnya, yang mampu melindungi tubuh dari kanker usus besar, kanker lambung, kanker pankreas, hingga kanker serviks. Di samping itu, pengaruh asam folat yang terdapat pada buah alpukat dapat membantu menurunkan risiko depresi. Lantaran, folat membantu mencegah penumpukan homosistein, yaitu zat yang dapat mengganggu sirkulasi dan pengiriman nutrisi ke otak. Jika sirkulasi tersebut terganggu, produksi hormon serotonin, dopamin, dan norepinefrin juga akan berdampak. Akibatnya, suasana hati, tidur, dan nafsu makan juga menjadi tidak teratur.

Tak hanya itu, khasiat di dalam buah alpukat juga mampu meningkatkan kesehatan otak. Hal ini diperoleh dari vitamin E yang memungkinkan kita terlindungi dari penyakit alz-

heimer atau perlambatan dalam kemampuan berpikir dan mengingat. Karena kandungan seratnya yang tinggi, buah alpukat diyakini mampu menurunkan risiko penyakit kronis. Melansir Heathline, studi tentang kebiasaan pola makan menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi alpukat lebih sehat ketimbang yang tidak mengonsumsinya. Hal ini, karena buah tersebut mempunyai nutrisi tinggi yang diyakini mampu menurunkan risiko penyakit jantung dan diabetes.

(Diolah dari berbagai sumber).



ILMUWAN UMUMKAN PENEMUAN SAMUDERA BARU

Pada momen Hari Laut Sedunia yang dirayakan 8 Juni 2021 lalu, National Geographic mengumumkan penambahan satu samudra baru yang berada di dekat Antarktika. Penambahan tersebut didasari atas pengamatan yang dilakukan para kartografer terhadap arus deras di sekitar Antarktika yang dinilai berbeda. Hasil pengamatan tersebut menyimpulkan perairan di kawasan itu layak memiliki nama tersendiri, yaitu Samudra Selatan (*Southern Ocean*). Sehingga, saat ini samudra di dunia tidak lagi berjumlah empat, melainkan lima, antara lain: Hindia, Pasifik, Atlantik, Arktik, dan Selatan.

Penambahan tersebut diyakini akan memengaruhi gambar peta dunia yang dibuat National Geographic ke depannya. Ahli Geografi di National Geographic Society, Alex Tait mengatakan, sejatinya pengakuan tentang Samudra Selatan oleh para ilmuwan telah terjadi sejak lama. Namun, hal itu urung terlaksana karena tidak adanya kesepakatan bersama. “(Keberadaan) Samudra Selatan telah lama diakui oleh para ilmuwan, tetapi karena tidak pernah ada kesepakatan in-

ternasional, kita tidak pernah secara resmi mengakuinya,” katanya.

Berbeda dari empat wilayah samudra lain yang ditentukan berdasarkan benua yang mengitari, Samudra Selatan diakui merujuk pada pertim-bangan arusnya. Arus perairan di Samudra Selatan atau lazim disebut Arus Lingkar Antarktika (ACC) dipandang memiliki keistimewaan tersendiri. Para ilmuwan memperkirakan arus tersebut telah terbentuk sejak 34 juta tahun lalu ketika Antarktika terpisah dari Amerika Selatan. Hal itu kemudian memungkinkan terbentuknya aliran air tanpa hambatan di sekitar dasar bumi.

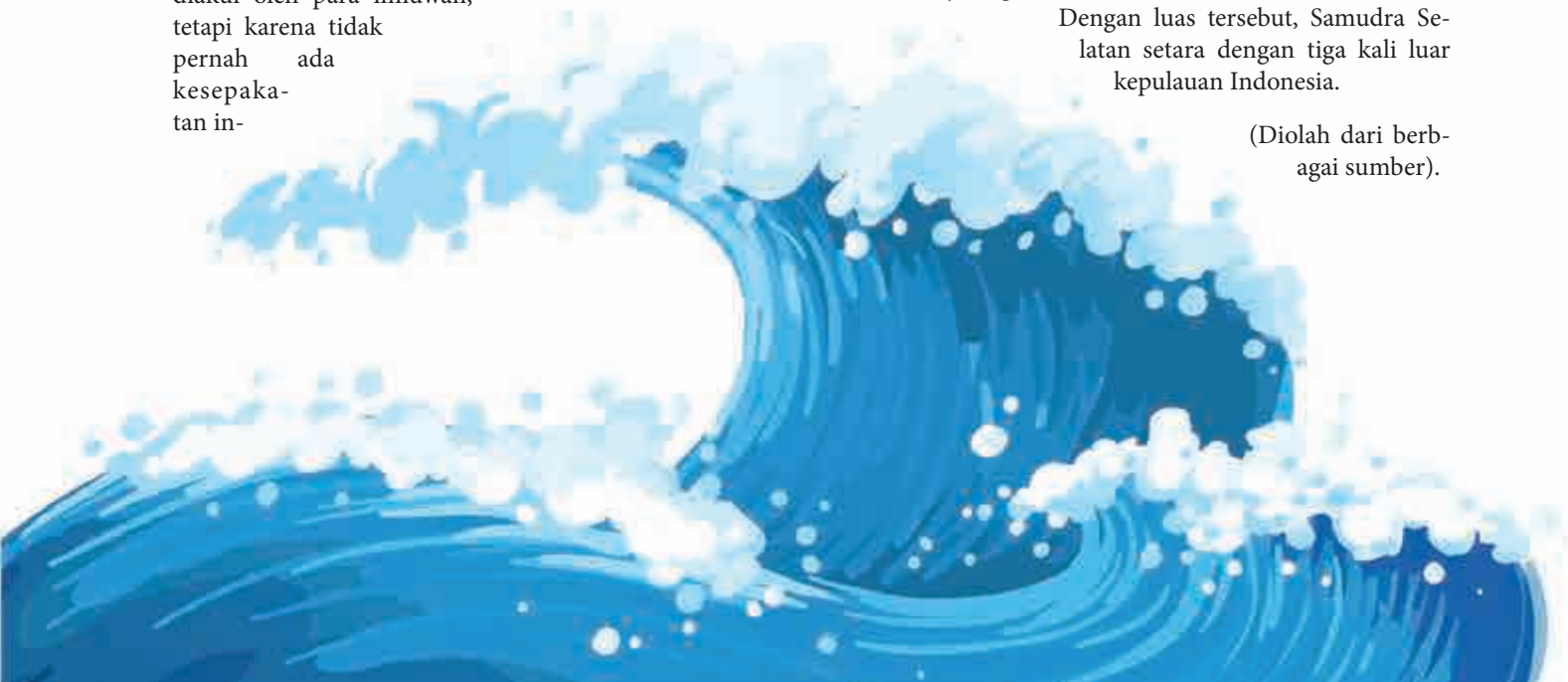
Dengan keberadaannya yang membentang dari permukaan hingga ke dasar laut, arus ACC diyakini membawa lebih banyak air dibandingkan arus laut lainnya. Arus tersebut melintang dari perairan Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Arus ini juga dinilai turut mendorong sistem sirkulasi global (*Conveyor Belt*), yang berperan mengangkut sistem panas bumi. Selain itu, karena kecenderungan airnya

dingin dan padat, arus pada Samudra Selatan dipandang ilmuwan dapat membantu menyimpan karbon di laut dalam. Sehingga hal itu menunjang keberlangsungan iklim di bumi.

Para ilmuwan mengungkapkan, Samudra Selatan juga memiliki bentuk ekologis yang berbeda. Di kawasan tersebut juga terdapat ribuan spesies makhluk hidup yang mengganggu hidupnya. “Samudra Selatan mencakup ekosistem laut yang unik dan rapuh yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang menakjubkan seperti paus, penguin, dan anjing laut,” terang Explorer in Residence National Geographic, Enric Sala.

Samudra Selatan sendiri terletak pada 60 derajat lintang selatan di samping bibir Benua Antarktika dan melingkupi bujur bumi. Samudra tersebut mengambil bagian selatan samudra seperti Atlantik, Hindia, dan Pasifik. Luasnya diperkirakan sepanjang 20.327.000 km² yang mencakup Laut Bellingshausen, Laut Amundsen, sebagian Laut Ross dan Drake Passage serta sebagian kecil dari Laut Weddell dan Laut Scotia. Dengan luas tersebut, Samudra Selatan setara dengan tiga kali luar kepulauan Indonesia.

(Diolah dari berbagai sumber).



Ketabahan Bapak

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Terakhir kali aku pulang kampung, Bapak sering memintaku mengantarnya mengunjungi sawah kami yang terletak di ujung desa. Rumpun padi yang ditanam Bapak tumbuh melebat, ketika padi-padi tetangga sedang sekarat. Hal ini tidak lain karena pupuk yang lebih banyak dan irigasi yang lebih baik di tengah masa sulit. Segenap petani tetangga memuji padi Bapak, mereka juga sempat iri. Tapi mau bagaimana lagi, modal yang dikeluarkan untuk mengurus padi mereka jauh lebih kecil.

Kata Bapak, mulai musim padi tahun ini harga pupuk naik menjadi hampir tiga kali lipat harga sebelumnya (barangkali karena penyabutan subsidi sebab harga barang tidak mungkin naik tiga kali lipat begitu saja, tapi bagi Bapak yang tidak tahu-menahu tentang negara, memahaminya sebagai kenaikan harga). Air dari langit juga seperti enggan turun meski seharusnya sekarang masih masuk musim hujan. Padahal yang namanya tanaman padi itu cepat sekali hausnya, dan manja kalau sudah menyangkut air. Jika tidak mendapat air sekurang-kurangnya lima hari sekali, pertumbuhannya akan terganggu. Namun jika dibanam air lama-lama, pangkalnya akan membusuk dan tanaman itu akan gampang terkena penyakit yang mengakibatkan kematian. Dengan kata lain, sawah yang ditanami padi harus mempunyai sistem pengairan dan pembuangan air yang bagus. Itulah kenapa padi di sawah kami hanya bisa ditanam pada musim hujan.

Tidak adanya air hujan saat musim padi membuat para petani kelabakan setengah mati. Mesin diesel memang sudah masuk ke desaku, yang dengannya kami bisa memompa air dari dalam tanah untuk irigasi sebanyak apa pun yang kami butuhkan. Namun biayanya jelas lebih mahal daripada air hujan atau irigasi bergilir dari bendungan. Aku pernah tanya pada Bapak, berapa selisih biaya pengairan menggunakan diesel dibanding irigasi bergilir.



Dia pun menjawab, “Kamu salah tanya. Bukan ‘selisih berapa’, tapi ‘berapa kali lipat’. Kalau kita dapat irigasi bergilir, paling hanya kasih sebungkus rokok ke Pak Sambong, kalau ada hujan malah gratis. Tapi kalau kita beli dari orang yang punya diesel, perjamnya lima belas ribu rupiah. Sementara untuk sekali pengairan kita butuh delapan sampai sepuluh jam. Tinggal dikalikan saja to?”

“Sungguh upaya yang berdarah-darah,” batinku berkata.

Namun Bapak tetap tabah. Sebab pekerjaan yang bisa digelutinya hanya bertani. Bapak pernah berkelakar suatu ketika, “Kalau Bapak bisa kerja kayak kamu, tinggal ngetik-ngetik jadi duit, akan Bapak lakukan. Enak sekali seperti itu. Kerja di ruangan ber-AC, tidak perlu panas-panasan, tidak perlu angkat yang berat-berat, malam hari dan akhir minggu pasti libur, dapat duitnya banyak. Tapi karena Bapak cuma bisa bertani, ya Bapak tanam padi sama jagung saja. Apa pun hasilnya, manut kehendak Gusti Pangeran.”

Zaman sekarang, orang tidak bisa kaya dari menanam padi. Justru lebih banyak ruginya. Harga pupuk melonjak seenaknya, sementara beras dari petani tetap dijaga rendah (kalau tidak begitu orang-orang kota yang tidak menanam padi sendiri akan protes). Kalau beras yang beredar di pasaran mulai menipis, harganya akan mulai naik, namun petani biasanya tidak sampai kebagian untung karena pemerintah selalu bisa mengimbangi dengan melakukan impor. Kalaupun ada untung dari kenaikan harga beras di pasar, pasti sudah disedot habis oleh para tengkulak. Inilah yang membuat penghasilan Bapak tetap rendah, labanya tipis setipis-tipisnya. Tunjuk satu kota yang mana saja, aku bisa menjamin penghasilan bapak lebih rendah dibanding UMR di kota tersebut. Itu pun kalau padinya bagus. Adanya hama belum masuk hitungan.

Yah, kesulitan dan tantangan yang diberikan zaman ini tidak membuat Bapak berkecil hati. Setidaknya, padi yang dia tanam tumbuh subur dan itu cukup menghibur sampai-sampai kesulitan-kesulitan yang dihadapinya tidak terasa memberatkan. Setiap hari Bapak memintaku mengantarnya ke sawah, sekadar untuk melihat hijaunya rumput-rumput padi di setiap petak sawahnya. Kadang pagi, kadang pula senja. Bapak telah menjadikan cocok tanam sebagai passion. Pekerjaannya adalah juga hiburannya. Baginya, padi yang tumbuh dengan subur adalah kebahagiaan tak terkira, meski jika dijual uangnya tidak seberapa.

Bapak tidak bisa mengendarai motor dan di usianya yang hampir kepala delapan itu mengendarai sepeda menguras tenaganya. Sementara sawah kami jauhnya tiga sampai empat kilometer dari rumah. Jadi aku mau-mau saja mengantar Bapak. Kebahagiaan Bapak adalah kebahagiaanku juga. Toh saat pulang kampung, aku memang menyediakan waktuku sepenuhnya untuk keluargaku, untuk Bapak, juga Ibu.

“Ayo, kamu juga perlu membonceng ibumu ke sawah. Biar dia lihat hijaunya padi-padi kita,” kata Bapak dengan penuh semangat sehabis pulang dari sawah bersamaku.

Tidak seperti Bapak, Ibu tidak menjadikan pekerjaan bertani sebagai passion. Namun itu bukan berarti dia tidak ikut bergembira dengan suburnya padi di sawah kami. Dia ikut bergembira, hanya saja kegembiraan itu tidak sampai membuatnya ingin mengunjungi sawah kami setiap hari sebagaimana Bapak. Meski begitu, karena Bapak selalu berpikir setiap anggota keluarga kami seharusnya berpikir dan bersikap seperti dia, ada sedikit kekecewaan yang terlihat di wajahnya ketika Ibu tidak kunjung pergi ke sawah untuk menyaksikan sendiri betapa gemuknya padi kami. Aku dan Ibu dapat membaca kekecewaan itu. Untuk menyenangkan Bapak kami pun pergi ke sawah, lalu kembali lagi setelah tak sampai lima menit melihat-lihat keadaan di sana.

Ketika masa cutiku habis, aku kembali ke kota untuk melanjutkan pekerjaanku. Semuanya tampak baik-baik saja kutinggal di desa. Sebulan lagi masa panen tiba dan tidak ada tanda-tanda akan ada masalah. Namun kami, terutama Bapak, sadar betul bahwa kami belum bisa benar-benar senang dan tenang sebelum padi kami menjadi gabah kering dalam karung yang ditumpuk di gudang.

Namun, secara mengejutkan dua hari yang lalu aku ditelpon Ibu. “Padi kita diserang wereng,” katanya dengan getir.

Kalau Anda mencari gambar wereng di internet, mungkin Anda akan mendapatkan gambar serangga mungil seperti lalat yang cantik, hinggap di daun padi. Warnanya hijau dan sayapnya transparan seperti panel dengan kerangka

penopang bercabang-cabang. Tapi coba bayangkan lagi jika serangga berukuran setengah senti itu jumlahnya ribuan, hinggap dalam barisan di batang-batang padi di depan Anda sambil dengan asyik menghisap cairan dari batang padi. Anda mungkin akan merasa jijik. Bayangkan juga, jika mereka melumat kerja keras Anda selama dua bulan, hanya dalam waktu satu minggu. Itulah yang dialami Bapak.

Satu batang padi sangat besar dibandingkan dengan ukuran tubuh satu ekor wereng, dan dengan demikian menyediakan makanan melimpah untuknya. Masalahnya, serangga brengsek itu bertelur ratusan butir. Dan daur hidup mereka cepat sekali. Padi yang gemuk sekalipun akan terancam gagal panen dalam waktu seminggu, sekali seekor wereng sudah terlihat hinggap di bulirnya. Ini bukan metafora. Ini kenyataan. Kenyataan yang tengah dialami oleh Bapak.

“Trus, bagaimana? Apa sudah disemprot pakai pestisida?” tanyaku pada Ibu dalam telefon itu.

“Sudah,” jawabnya. “Tapi sudah telat. Bapak tidak ke sawah lagi sejak kamu balik ke kota, sampai kemarin itu. Lama tidak dikunjungi, ternyata lebih dari separuh padi kita sudah kering, ludes disedot wereng. Padahal padi kita belum juga berbiji. Tadi pagi kedua pamanmu yang diminta Bapak untuk menyemprot. Pamanmu bilang, hari ini dia sarapannya dua, nasi bungkus dan wereng. Jumlahnya terlalu banyak. Kalau daun padinya disibak, werengnya berterbangan ke mulut dan hidung.”

“Kelakar yang tidak tepat,” keluhku pada Ibu. “O iya, Bapak di mana, Bu?”

“Bapak sudah tidur sekarang.”

“Baiklah, besok saja saya akan ngobrol dengan Bapak.”

Tidak lama kemudian, pembicaraan kami segera beralih ke topik lain. Tapi aku tidak bisa fokus karena aku memikirkan Bapak. Hatinya pasti hancur ketika melihat harapannya yang berwujud padi di sawah kami itu pupus, ludes, lenyap dimakan wereng. Aku mengakhiri pembicaraan tak lama kemudian.

Besoknya, aku menelfon rumah selepas maghrib. Ibu yang mengangkat, tapi aku langsung memintanya memberikan telefon pada Bapak. Suara Bapak pun segera menyahut. Anehnya, aku sama sekali tidak menemukan nada kesal, marah, jengkel, getir atau bahkan kecewa dalam suara itu. Justru nada bicara Bapak sangat ringan dan renyah, seperti tidak terjadi apa-apa.

“Ya, benar. Sawah kita memang diserang wereng dan kita terancam gagal panen,” Bapak mengonfirmasi. “Tapi ke-

marin sawah kita sudah disemprot. Kita tinggal berdoa saja pada Tuhan. Semoga masih ada sisa gabah untuk kita. Setidaknya kita tidak sendiri, sawah tetangga-tetangga kita juga diserang wereng.”

“Tapi kata Ibu, sawah kita yang paling parah, Pak?”

“Iya, memang. Karena padi kita memang yang paling gemuk, awalnya. Kan kamu juga lihat sendiri. Tapi ya, mau bagaimana lagi. Ini adalah ujian dari Gusti Pangeran, dan kita harus tabah. Bapak sih, biasa saja. Rugi... Ya rugi memang. Tapi ya... biasa saja. Habis ini nanam jagung, lalu padi lagi.”

Di sini aku justru kesal sendiri karena tidak bisa membantu secara langsung. Aku hendak bertanya, insektisida apa yang dipakai untuk menyemprot wereng-wereng biadab itu, apakah insektisida itu sudah terbukti ampuh atau belum, berapa dosis yang sudah disemprotkan, apakah itu sudah sesuai dengan aturan pakai, dan sebagainya. Barangkali, jika tidak bisa membantu tenaga karena masalah jarak, aku bisa membantu dengan menyumbangkan informasi yang berguna. Aku memang tidak banyak tahu perkara dunia pertanian, tapi toh aku kenal betul dengan yang namanya Google, sementara Bapak tidak sama sekali. Namun sebelum aku sempat bertanya, Bapak sudah menambahkan kata-katanya tadi.

“Omong-omong, tadi Bapak ketemu pak Kandar yang sawahnya bersebelahan dengan kita. Dia menyayangkan, padi kita awalnya juara, sekarang nggak ada harapan. Trus Bapak jawab, ya memang, dari awal niat Bapak bukan untuk mendapatkan beras, tapi untuk berternak wereng. Trus kami berdua tertawa di sawah.”

Mendengar itu, pertanyaan-pertanyaan yang sudah di ujung lidah tadi kutelan kembali. Aku menjadi sadar bahwa Bapak bisa menopang mentalnya sendiri menghadapi kenyataan yang tidak mengenakkan hati, bahwa sawah kami terkena hama yang parah sampai gagal panen membayang di pelupuk mata. Kalau dipikir lagi, seandainya aku jadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu hanya akan membawa kembali beban yang berusaha Bapak lepaskan. Benar katanya, dia sudah melakukan apa yang bisa dia lakukan, selebihnya pasrahkan saja pada Tuhan dan siap menyusun agenda untuk pekerjaan selanjutnya.

Meski begitu, aku masih ingin membantu. Jadi kuputuskan untuk mencari lemburan-lemburan di akhir minggu. Nanti uangnya akan kukirim ke Bapak guna menambal kerugiannya, serta untuk membelikan dia makanan kesukaannya, gulai kambing.



Sawah Kutukan

Oleh: Hari Taqwan Santoso

P antatku menduduki jok bus yang sobek dan berbau apak. Udara terasa gerah. Butir-butir keringat merembes melalui lubang-lubang kecil di sekujur tubuhku, tapi tak sampai membuat pakaian yang menempel padanya basah. Sekarang memang sedang musim kemarau. Hawa di sekelilingku seharusnya tidak terlalu panas. Gerah yang kurasakan lebih disebabkan karena banyaknya orang yang mengumpul di satu ruangan yang sempit alih-alih karena cuaca.

Aku duduk di jok samping supir. Mataku menatap lurus ke depan. Dengan setumpuk harapan, beberapa potong pakaian dalam ransel serta beberapa lembar uang ratusan ribu di dompet, aku meninggalkan kampung halamanku untuk pergi mengadu nasib di ibukota.

“Yok! Minal-minal-minal!” terdengar suara kenek berseru, menawarkan jasa bus yang siap sedia mengantar siapa saja menuju terminal.

Bus itu sudah tua, orang bisa melihat satu lubang kecil di sudut atapnya yang keropos oleh karat. Ia tidak menggunakan AC, hanya kipas angin yang dipasang di atas kepala si supir, itu pun mati. Dudukku terasa tidak nyaman karena bus itu sesak dan panas. Namun aku bisa menahannya. Lagipula gerah ini tidak akan lama. Di terminal nanti aku akan beralih ke bus yang lebih besar; bus yang menggunakan AC, berjok kulit dan cat baru yang tidak mengenal karat. Ratusan kilometer di depan, ibukota telah menanti.

Ada yang mengatakan bahwa kejamnya ibu tiri tak sekejam ibukota. Sejujurnya, aku tidak paham dengan orang yang mengatakan itu. Kata-kata itu menyiratkan bahwa semua ibu tiri itu pasti kejam, dan ibukota lebih kejam lagi. Kalau kita menonton sinetron-sinetron di televisi kemungkinan besar kita akan mendapati ibu tiri selalu digambarkan sebagai sosok munafik yang bermulut manis di depan suami namun suka menyiksa anak tirinya di belakang. Nyatanya tidak semua ibu tiri seperti itu. Tetangga sebelah rumahku seorang ibu tiri, anak bawahan suaminya ada dua dan masih kecil. Mereka baik-baik saja. Aku tahu mereka rukun, karena jika ada penyiksaan atau umpatan-umpatan seperti dalam sinetron televisi itu ketika sang suami sedang tidak ada, pasti aku bisa mendengarnya karena rumah kami ha-

nya dipisah oleh kandang kambing saja.

Dan kalau ibukota itu kejam, kenapa tempat itu menjadi tempat terpadat nomor satu senegara? Orang dari berbagai golongan berbondong-bondong datang untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Jika benar ibukota itu kejam, bukankah seharusnya ia menjadi tempat yang dihindari dan dijauhi? Bukankah ia seharusnya menjadi lebih sunyi dari padang pasir alih-alih lebih ramai dari sarang semut?

Dalam hati, aku optimis saja. Cara berpikirku sederhana; di mana ada banyak orang, di situ pasti ada banyak pekerjaan, pun juga ragamnya. Mendapat kerja semudah membalik telapak tangan, demikian pula berganti pekerjaan bila kita sudah bosan atau merasa tidak cocok dengan majikan. Begitu bayanganku tentang ibukota. Setelah sampai di sana nanti, aku akan melakukan apa saja untuk bisa bertahan sambil mencari peluang yang lebih baik. Jika peluang semacam itu sudah kutemukan, aku akan segera berganti pekerjaan. Aku akan bekerja keras, mendaki tangga karir dari dasar sampai ke puncak. Begitulah rencanaku.

Sebenarnya aku bukan orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali sampai harus pergi jauh-jauh dari rumah sekadar untuk mendapatkan kerja. Kampungku menyediakan lahan yang lapang untuk bekerja. Sebelum ini aku adalah petani desa dan bisa-bisa saja kuteruskan pekerjaan itu. Aku bahkan punya sawah sendiri; sepetak tanah yang diwariskan bapakku. Bapakku mewarisinya dari kakekku, kakekku dari kakek buyutku dan seterusnya. Luasnya lumayan lah, 1 kotak (1.400 m²). Jika aku mencurahkan waktu dan tenaga untuk mengolahnya, maka aku tidak akan pernah kekurangan bahan makanan. Gabah dan jagung selalu ada di dapur. Tapi hanya mulutku sendiri saja yang bisa kusuapi jika aku tetap menjadi petani, bahkan setelah memeras berliter-liter keringat di sawah itu. Jika aku sudah punya istri, apa lagi anak nanti, maka hasil panen yang kudapat akan sangat kurang. Itulah kenapa aku harus hengkang dari desa dan mengadu nasib di ibukota.

Ada satu hal menarik tentang sawah itu. Dulu sempat ada selentingan yang mengatakan bahwa ia adalah sawah kutukan, pemiliknya akan hidup makmur sebentar kemudian mati dengan cara yang tidak wajar. Secara kebetulan, buyut

hingga bapakku mendapat hasil melimpah. Padi kami selalu padat berisi. Jagung kami bertongkol dua atau tiga. Aku berani bersumpah bahwa biji-bijinya nyaris sebesar biji asam. Tidak ada hama, tidak ada gulma. Dan, secara kebetulan lagi, buyutku mati karena jatuh dari pohon kelapa, kakekku mati diseruduk sapi gila tetangga, sementara bapakku kena serangan jantung.

Beberapa orang desaku menganggap semua kematian-kematian ini tidak wajar. Silakan saja. Memang begitulah cara berpikir mereka. Tapi jika kita sedikit kritis, maka kita akan mendapati bahwa tidak ada yang tidak wajar di sini. Mati karena jatuh dari ketinggian 5 meter dalam posisi kepala lebih dulu, atau karena dada beradu dengan tanduk sapi, atau karena penyakit yang membuat jantung berhenti berdegup seketika, apanya yang tidak wajar? Kalau mereka semua masih hidup setelah kejadian-kejadian tersebut, itu yang justru tidak wajar.

Aku tidak percaya pada kutukan yang mengakibatkan kematian tidak wajar. Itu hanya cerita yang mengada-ada. Lagipula sawah itu milikku, warisanku. Suka atau tidak, dia adalah bagian dariku dan keluargaku. Semasa kakekku muda petani serupa raja, beras segantang seharga tanah satu meter. Itu bukan isapan jempol belaka. Pada masa bapakku, hasil sawah masih lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia bahkan sempat menabung banyak meskipun akhirnya menjadi penggila togel dan tabungan itu raib di kantong bandar. Sedang di masa sekarang, aku mulai kesulitan menghidupi diriku. Padahal kebutuhanku baru makan dan minum semata. Jika kutukan-kutukan nyata yang kusebutkan tadi terus-terusan mendesakku maka tidak lama lagi aku akan hidup dalam kekurangan. Terpasung dan menjadi petani desa bukan lagi pilihan hidup yang bijak.

Aku tidak ingin terkutuk selamanya. Aku mendapat gagasan untuk keluar dari desa dan mengadu nasib, tidak hanya di kota tapi di ibukota sekalian, supaya peluangnya juga jauh lebih menjanjikan. Kusewakan tahunan sawahku pada seorang teman, uangnya kugunakan untuk modal mencari kerja. Aku sengaja tidak menjualnya. Jadi kalau-kalau nanti aku gagal di ibukota aku masih punya aset. Meski aku sangat percaya diri tapi rencana cadangan harus selalu ada. Itu gagasan yang brilian. Tepatnya... sangat brilian, bukan begitu? Yah, pada akhirnya aku lebih cerdas dari orang-orang desaku yang merelakan diri mereka terkutuk selamanya dengan penghasilan seadanya.

Bus yang kutumpangi sudah lepas landas dari Halte Pasar Legi. Setelah ini bus akan melewati area persawahan yang luas dan sepuluh menit setelahnya tiba di terminal. Angin sepoi menghembus badan bus dari arah timur; angin musim kemarau yang dingin dan kering. Jendela bus yang terbuka membuat angin itu masuk dan membagi dinginnya pada tubuhku yang sedari tadi diterpa gerah. Inilah angin perubahan, yang dengannya aku menyongsong se-

buah perubahan sekali dan untuk selamanya. Angin yang merontokkan debu-debu yang berasal dari kulit padi di ujung rambutku. Angin yang menanggalkan helai-helai rambut jagung yang membuat gatal itu dari bajuku. Aku akan hidup di ibukota, menjadi kaya dan terpandang, lepas dari kutukan kemelaratan di dunia pertanian.

Selain hawa sejuk, angin ini rupanya juga membawa kantuk yang menerkamku kuat-kuat. Aku berusaha menahan kelopak mataku, tapi apa daya rasa kantuk ini jauh melebihi batas kekuatanku. Mulutku sering terbuka lebar, menguapkan udara bersama kesadaran. Seolah sebagian rohku turut keluar bersamanya. Aku tidak seharusnya tidur karena tidak sampai setengah jam lagi aku harus berganti kendaraan, tapi akhirnya aku menyerah. Meski begitu, aku tidak mau tetap tidur pada saat bus ini sampai ke terminal nanti. Akan repot kalau itu terjadi. Maka katur alarm di dari telepon genggam yang kukantongi, dua puluh menit.

Kupererat pelukanku pada tas ransel yang kupangku. Kuharap tak terjadi apa-apa saat aku tidur. Biasanya bus ini aman dari tukang copet. Tapi aku sendirian di sini. Dari pakaian serta ransel yang kubawa siapa pun langsung paham bahwa aku akan bepergian jauh. Orang pasti akan berpikir kalau aku mengantongi banyak uang. Ketika aku tidur tak akan ada yang menjaga tas ranselku. Oleh karena itu yang bisa kulakukan hanya memeluk tas ini dengan lebih erat sambil melafalkan doa selamat.

Mataku sudah tertutup tapi aku masih sadar ketika kurasakan darah di sekujur tubuhku seperti ditarik ke belakang. Si supir menginjak tuas gas kuat-kuat supaya busnya melaju dengan kencang. Biarlah. Mungkin dia sedang mengejar setoran. Bagi para pekerja kelas bawah seperti kami, mencari uang memang sangat sulit sekarang ini.

Aku hendak memasuki alam ketidaksadaran, tapi mendadak tubuhku terasa seperti dibanting. "Wit asem, Pak!" Si kenek berseru.

Si supir memutar jauh setirnya ke kiri karena menghindari tabrakan dengan dua mobil yang saling menyalip dengan kecepatan tinggi dari depan. Namun hasilnya dia malah menerjang pembatas jalan dan menumbuk pohon asam tua (satu-satunya pohon besar di area persawahan itu). Tak ada yang selamat dalam kecelakaan naas itu, termasuk juga aku.

Sialan! Sawah itu benar-benar sawah kutukan. Aku tidak dia izinkan pergi untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Sejengkal kutinggalkan desa, aku sudah menemui celaka. Tapi untungnya, sekarang aku sudah tidak perlu berurusan dengannya lagi. Aku tidak perlu pusing lagi dengan turunnya harga jagung dan gabah lagi, tidak perlu mengemis pupuk subsidi lagi, tidak perlu saling serobot irigasi lagi, karena nyawaku telah melayang ke langit yang tinggi.

KEADAAN KAHAR

Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, selamat pagi Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya dengan jelas kan?” ujar Pak Ruslan menyapa peserta dalam rapat yang berlangsung secara virtual. Pagi itu, Pak Ruslan memang diundang oleh salah satu kementerian untuk menjadi narasumber dalam rapat koordinasi yang digelar dengan skala nasional. Terlihat hampir seribu lebih peserta hadir dalam rapat tersebut. Penampilannya necis dengan rambut klimis dibalut kemeja berwarna putih bersih. Meski kita tidak tahu setelan bawahan apa yang dipakainya saat itu, karena memang ruang virtual hanya menampakan setengah badan dari diri kita. Bisa jadi, ia hanya mengenakan celana kolor bekas tidurnya tadi malam. Namun apa peduli, yang terpenting dirinya fasih berceloteh sana-sini tentang bagaimana birokrasi seharusnya dikelola.

Sesekali Pak Ruslan kelimpungan ketika ia ingin berpindah dari satu paparan ke paparan lainnya untuk ditayangkan. “Maaf ya Bapak Ibu, sebentar kok saya gak bisa *share screen* bahan ini yah?”. Dengan usia Pak Ruslan yang sudah paruh baya, teknologi rapat virtual tentu bukan barang yang akrab buat dirinya. Satu tombol saja yang berpindah letak dalam sistem, pasti akan membuat Pak Ruslan jengkelnya bukan main dan menganggap teknologi itu merepotkan. “Owalah, ini dia tombolnya. Sudah terlihat kan Bapak Ibu.” Seketika para peserta memberikan emotikon jempol, tanda tayangannya tidak ada masalah lagi.

Dirinya kembali melanjutkan paparannya. Namun belum semenit ia menjelaskan, terdengar sayup-sayup keriang-an anak-anak kecil yang sedang bermain. Tentu saja, hal itu membuat Pak Ruslan dan para peserta lainnya terganggu. Apalagi dirinya sedang menjelaskan substansi terpenting dari paparannya, yaitu bab reformasi birokrasi. “Sebentar Bapak Ibu. *Haduh dek-dek*, mainnya jangan disini dulu! Eyang lagi kerja yah. Sama mamah dulu di sana.” Mana tahu bocah-bocah itu, kalau ternyata Pak Ruslan sedang serius bekerja. Dalam benak mereka, tentu rumah bukanlah kantor, tempat dimana eyangnya setiap hari pergi berpamitan dengan setelan kemeja yang rapi.

Tidak terasa sudah 1 jam lebih Pak Ruslan tampil di layar kaca itu. Lembar demi lembar paparannya telah tuntas ia sampaikan. “Baik, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu?” Beberapa saat suasana jadi hening. Pak Ruslan menatap dengan teli-



Ilustrasi Pch.vector

ti, sekiranya ada peserta yang mengacungkan jarinya. Namun yang terlihat kebanyakan hanya peserta yang sibuk dengan beragam aktivitasnya di balik layar. Walaupun terdapat satu dua peserta yang dengan serius memperhatikan meski dengan tatapan kosong. Syukurlah, ada Ibu Sri yang mengacungkan jarinya. “Silakan Ibu Sri, dari bagian kepegawaian yah, monggo apa yang ingin ditanyakan?” sambut Pak

Ruslan dengan semangat.

“Terima kasih Pak Ruslan atas paparannya yang sangat menarik dan mencerahkan. Saya ingin bertanya menyoal zona integritas. Bagaimana kiat-kiat agar unit kerja bisa menerapkan zona integritas dengan baik hingga mendapat predikat WBK dan WBBM?” tanya Ibu Sri.

Sebuah tanggapan yang tentu sangat diharapkan oleh Pak Ruslan. Sebentar ia mulai menggeser-geser paparannya, berniat ingin menunjukkan bagian yang punya relevansi terhadap pertanyaan itu. Sudah bersiap ia melontarkan jawabannya, tiba-tiba terdengar celoteh segerombolan ibu-ibu “Jeng, pada mau makan siang sop patin yah, ikut dong. Habis rakornas inilah yah tungguin sebentar lagi selesai kok!” Ternyata Ibu Sri lupa mematikan mikrofonnya sesaat setelah dia bertanya dalam forum itu. Sontak admin rapat virtual kaget dan langsung buru-buru mematikan mikrofon Ibu Sri. Pak Ruslan yang awalnya bersemangat, langsung hilang *mood*. Namun dengan dedikasinya ia tetap menjawab pertanyaan Ibu Sri meski dengan setengah hati.

Demikianlah acara rapat koordinasi nasional yang dihelat secara virtual. Setelah beberapa narasumber tampil secara bergantian, acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. Kemudian Pak Ruslan segera meminta ijin keluar dari ruang virtual, untuk kembali melanjutkan rapat virtual di tempat lainnya. Sedangkan para peserta rapat sibuk menanyakan absensi kehadiran kepada panitia yang kelak akan ditukarkan dengan sebuah sertifikat. Sesuatu yang mungkin menjadi tujuan paling utama mereka hadir di forum tersebut.

Begitulah sekelumit cerita fiksi yang menggambarkan seremoni birokrasi saat ini. Hadirnya pandemi, meniadakan hiruk-pikuk aktivitas birokrasi yang dulu sering kita jumpai. Memang pagebluk memaksa kita untuk belajar, layaknya Pak Ruslan yang tergopoh-gopoh mengikuti kereta perubahan. Namun dengan keadaan kahar saat ini, berubah menjadi lebih baik adalah sebuah keniscayaan.

call for PAPER

MATRA PEMBARUAN



Mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mempublikasikan hasil-hasil riset mutakhir di Jurnal Matra Pembaruan Volume 2021, yang akan diterbitkan pada 2 (dua) edisi yaitu Mei dan November.

Registrasi dan submit artikel anda di

<http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp>

Jalan Kramat Raya No.132, Senen, Jakarta Pusat
0812 8165 6781/Shinta (Whatsapp Only)
matrapembaruan@gmail.com



- Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat
- Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38000 s.d 40000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah Dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.
- Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespons isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan
- Karena berbasis OJS, maka naskah akan dipublikasikan setiap awal bulan terbit setelah melalui review dan editing.
- Sumber referensi minimal 10 sumber yang berasal dari jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui daring (*online*).
- Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Menggunakan gaya APA (*American Psychological Association*).

Google Scholar



CALL FOR PAPER

JURNAL BINA PRAJA

Jurnal Bina Praja (JBP) is an open access journal which publishes significant, cutting-edge, and multidisciplinary research drawn from all areas of Governance.



JBP *Journal of Home Affairs Governance*

Its central aim is thereby to enhance the broad scholarly understanding of the range of contemporary political and governing processes, and impact upon of states, political entities, international organizations, communities, societies and individuals, at international, regional, national, local, and village levels.

April, Agustus & Desember

TERMS & CONDITIONS

- Open to the public
- Manuscript may contain the results of empirical or nonempirical research
- Manuscript should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team
- Submitted manuscript have not been published in other media
- Manuscript should have a minimum of 35000-38000 character in Indonesian or English (preferably in English)
- For the writing systematic and format, see <http://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/index>
- A minimum of 25 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduated theses, and/or other research report
- Attach biodata along with complete mailing address and contact number.



jurnal.kemendagri.go.id

For more details | 08812 1941 9885/redaksijbp@gmail.com

INDEXED BY:

